PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jl. Jaya Wijaya No2 Kampung JawaKecamatan Pesisir Tengah 34874
E-mail. satpolppkpb@gmail.com

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
NOMOR : 000.8.3.1/585 /IV.05/2024

TENTANG

PETA PROSES BISNIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses diperlukan penataan ketatalaksanaan; dan
b. Bahwa agar penataan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana, berdaya guna dan berhasil guna perlu menyusun peta proses bisnis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Peta Proses Bisnis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

Dipindai dengan CamScanner

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);

7. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 348);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor : B/314/KPTS /08/HK-PSB/2022 tentang Tim Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disebut Proses Bisnis yang Meliputi Peta Proses Bisnis, Peta Sub Proses, Peta Lintas Fungsi, serta Peta Relasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun berdasarkan hubungan kerja antar Perangkat Daerah maupun Bidang di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Barat sesuai tugas pokok dan fungsi, untuk mencapai Visi Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, digunakan sebagai acuan Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Barat dalam mewujudkan hubungan kerja yang efektif dan efisien.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 25 Maret 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR BARAT,

CAHYADI

Tembusan :
1. Bupati Pesisir Barat.

Dipindai dengan CamScanner

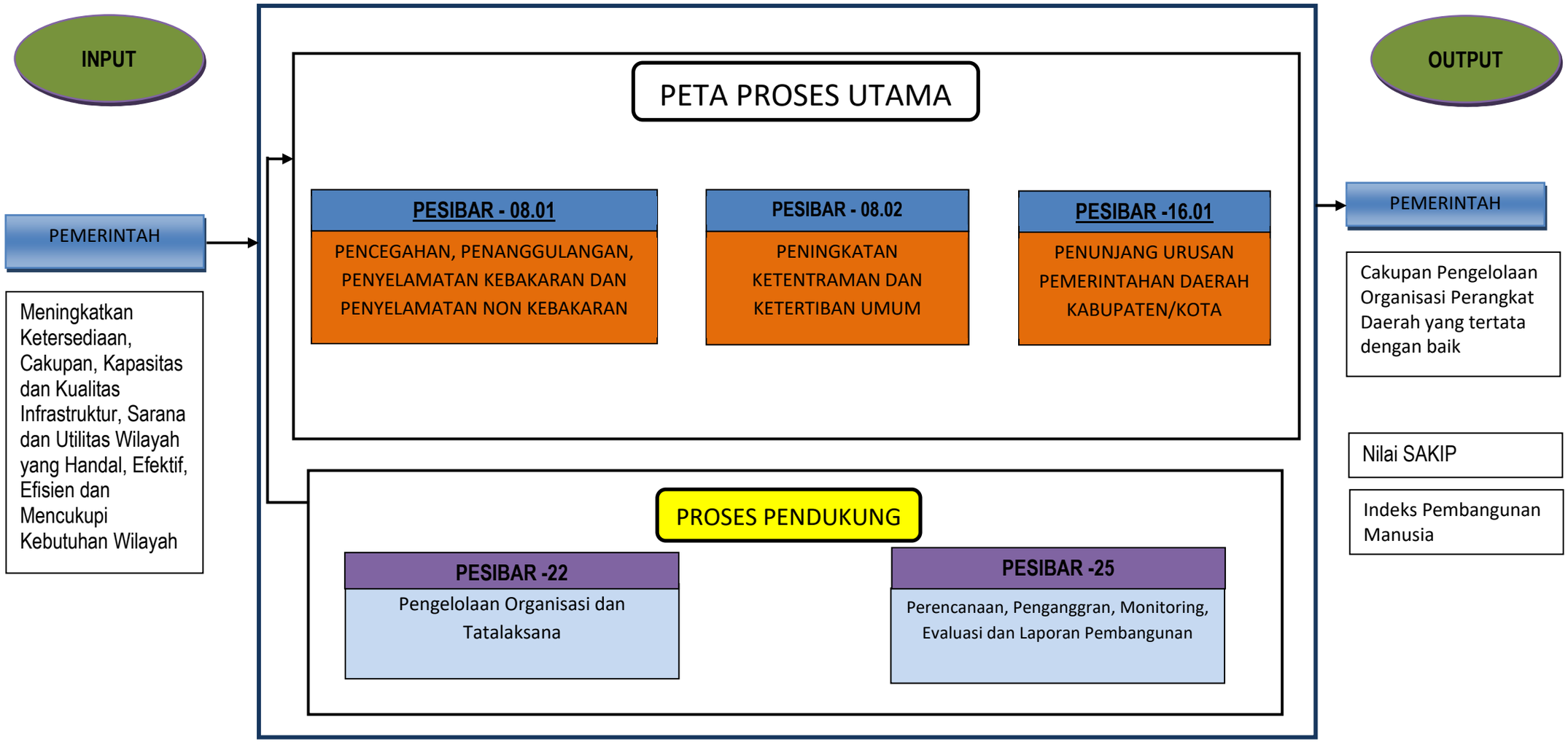
INPUT
PETA PROSES UTAMA
OUTPUT
PEMERINTAH
PESIBAR - 08.01
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
PESIBAR - 08.02
PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PESIBAR -16.01
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMERINTAH
Cakupan Pengelolaan Organisasi Perangkat Daerah yang tertata dengan baik
Meningkatkan Ketersediaan, Cakupan, Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur, Sarana dan Utilitas Wilayah yang Handal, Efektif, Efisien dan Mencukupi Kebutuhan Wilayah
Nilai SAKIP
Indeks Pembangunan Manusia
PROSES PENDUKUNG
PESIBAR -22
Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana
PESIBAR -25
Perencanaan, Penganggran, Monitoring, Evaluasi dan Laporan Pembangunan

INPUT

Meningkatkan Ketersediaan, Cakupan, Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur, Sarana dan Utilitas Wilayah yang Handal, Efektif, Efisien dan Mencukupi Kebutuhan Wilayah

PETA SUB PROSES

PESIBAR -16.01

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PESIBAR -16.01.01

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

PESIBAR -16.01.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

PESIBAR -16.01.03

Administrasi Umum Perangkat Daerah

PESIBAR -16.01.04

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

PESIBAR -16.01.05

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

PESIBAR -16.01.06

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

OUTPUT

- Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah
- Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu
- Persentase aparatur yg berkinerja baik
- Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja
- Persentase Pemenuhan Layanan Pendukung
- Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik

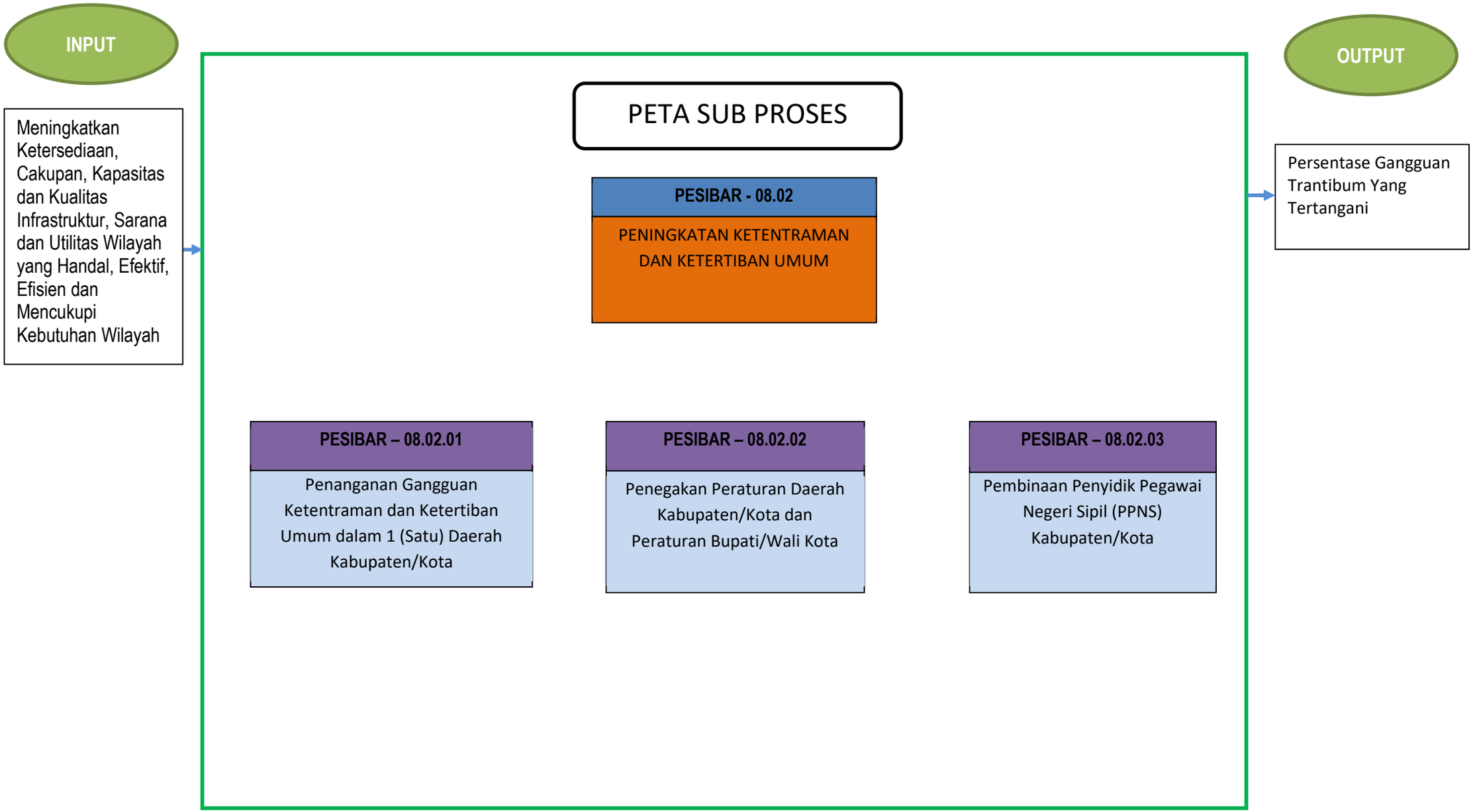
INPUT
Meningkatkan Ketersediaan, Cakupan, Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur, Sarana dan Utilitas Wilayah yang Handal, Efektif, Efisien dan Mencukupi Kebutuhan Wilayah
PETA SUB PROSES
PESIBAR - 08.02
PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
PESIBAR – 08.02.01
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
PESIBAR – 08.02.02
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
PESIBAR – 08.02.03
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
OUTPUT
Persentase Gangguan Trantibum Yang Tertangani

INPUT

Meningkatkan Ketersediaan, Cakupan, Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur, Sarana dan Utilitas Wilayah yang Handal, Efektif, Efisien dan Mencukupi Kebutuhan Wilayah

PETA SUB PROSES

PESIBAR - 08.01

PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

PESIBAR - 08.01.01

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

OUTPUT

Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kebakaran

INPUT

Meningkatkan Ketersediaan, Cakupan, Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur, Sarana dan Utilitas Wilayah yang Handal, Efektif, Efisien dan Mencukupi Kebutuhan Wilayah

PETA SUB PROSES

PESIBAR -16.01.01

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

PESIBAR -16.01.01.01

Penyusunan Dokumen Perncanaan Perangkat Daerah

OUTPUT

Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah

Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu

INPUT

Meningkatkan Ketersediaan, Cakupan, Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur, Sarana dan Utilitas Wilayah yang Handal, Efektif, Efisien dan Mencukupi Kebutuhan Wilayah

PETA SUB PROSES

PESIBAR -16.01.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

PESIBAR -16.01.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

PESIBAR -16.01.02.02

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

PESIBAR -16.01.02.03

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

PESIBAR -16.01.02.04

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Proqnosis Realisasi Anggaran

OUTPUT

Persentase Pelaporan Keuangan Tepat WaktuTepat Waktu

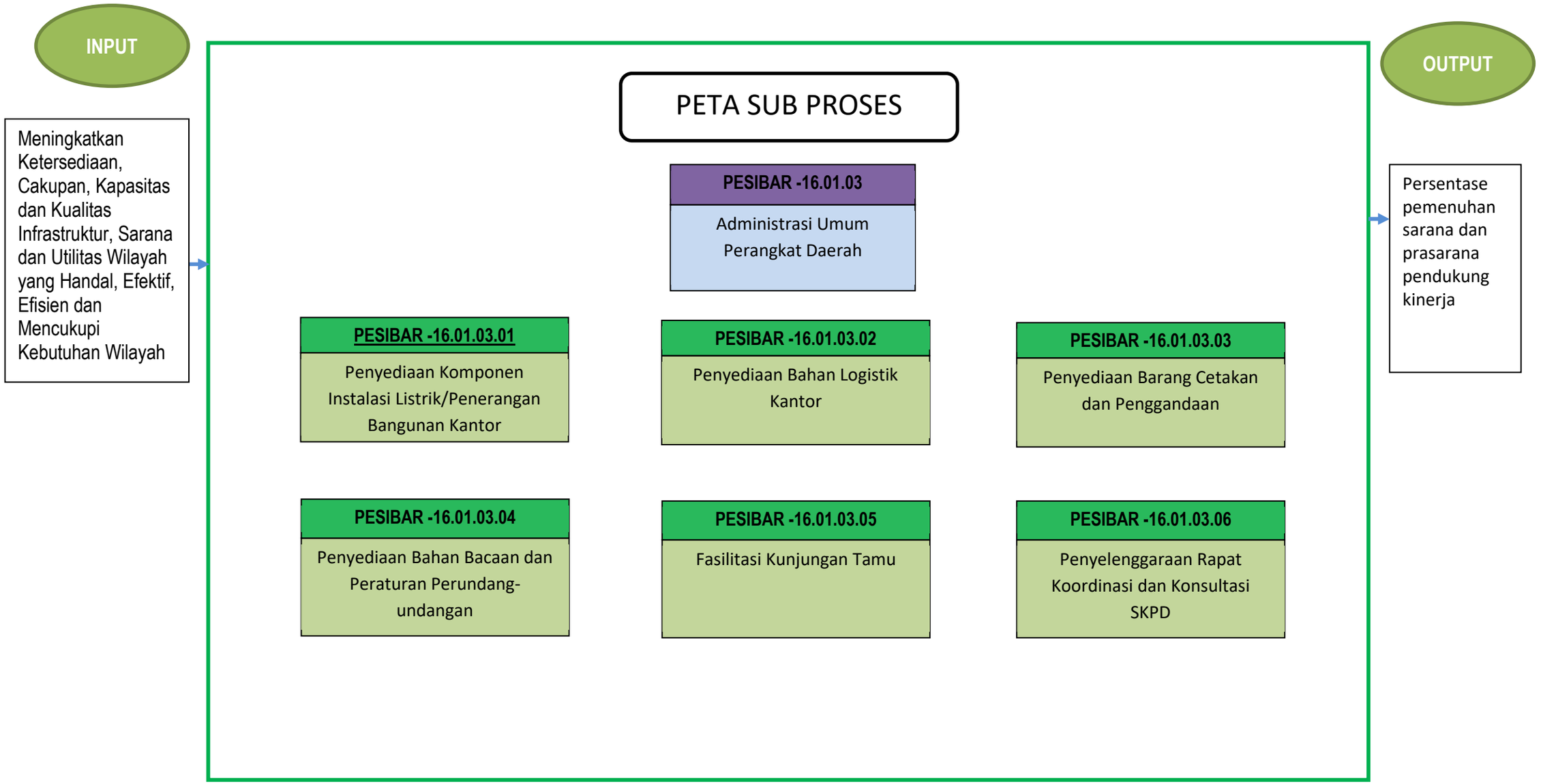
INPUT
Meningkatkan Ketersediaan, Cakupan, Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur, Sarana dan Utilitas Wilayah yang Handal, Efektif, Efisien dan Mencukupi Kebutuhan Wilayah
PETA SUB PROSES
PESIBAR -16.01.03
Administrasi Umum Perangkat Daerah
PESIBAR -16.01.03.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
PESIBAR -16.01.03.02
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
PESIBAR -16.01.03.03
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
PESIBAR -16.01.03.04
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
PESIBAR -16.01.03.05
Fasilitasi Kunjungan Tamu
PESIBAR -16.01.03.06
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
OUTPUT
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja

INPUT

Meningkatkan Ketersediaan, Cakupan, Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur, Sarana dan Utilitas Wilayah yang Handal, Efektif, Efisien dan Mencukupi Kebutuhan Wilayah

PETA SUB PROSES

PESIBAR -16.01.04

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

PESIBAR -16.01.04.01

Pengadaan Mebel

OUTPUT

Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja

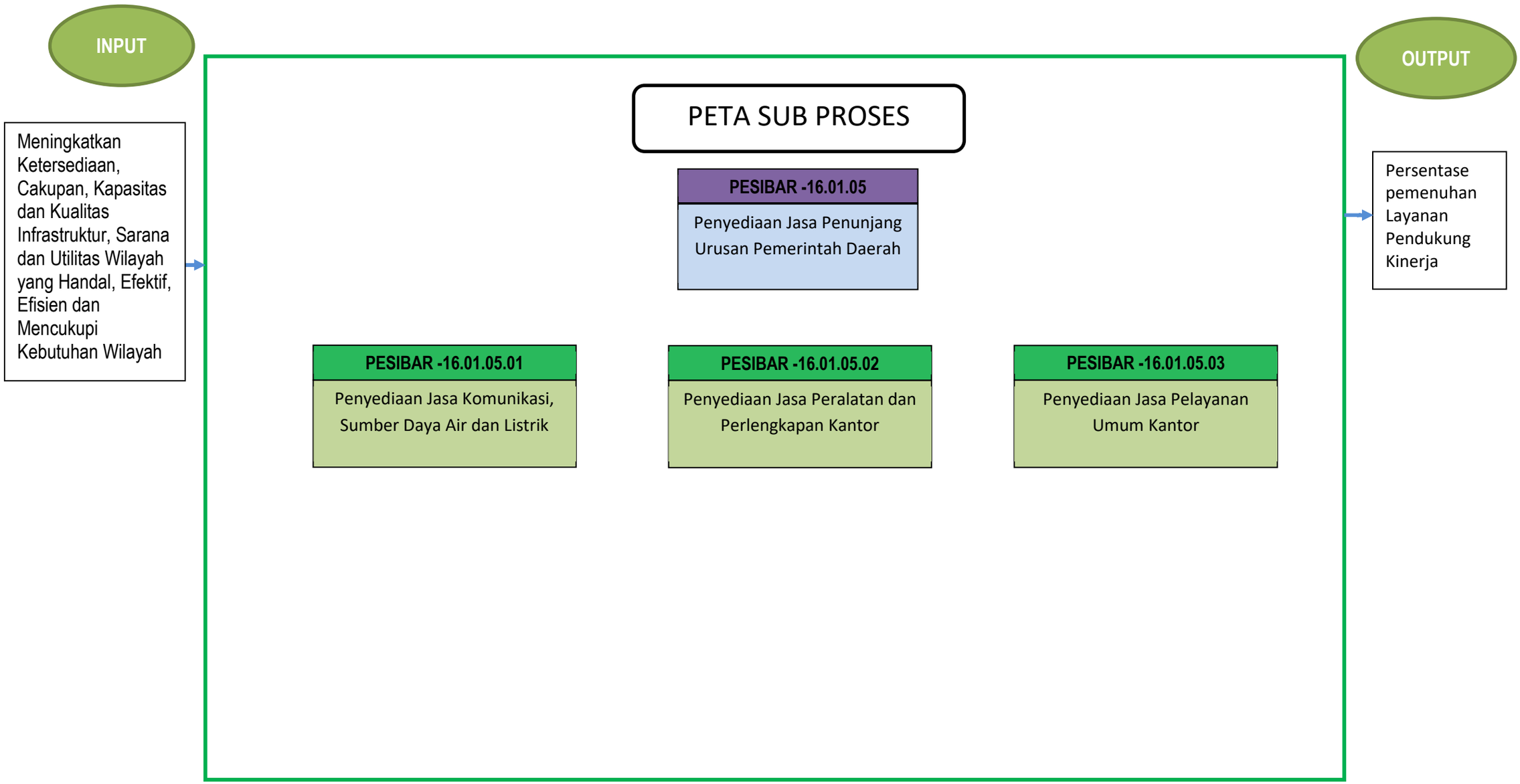
INPUT
Meningkatkan Ketersediaan, Cakupan, Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur, Sarana dan Utilitas Wilayah yang Handal, Efektif, Efisien dan Mencukupi Kebutuhan Wilayah
PETA SUB PROSES
PESIBAR -16.01.05
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
PESIBAR -16.01.05.01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
PESIBAR -16.01.05.02
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
PESIBAR -16.01.05.03
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
OUTPUT
Persentase pemenuhan Layanan Pendukung Kinerja

INPUT

Meningkatkan Ketersediaan, Cakupan, Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur, Sarana dan Utilitas Wilayah yang Handal, Efektif, Efisien dan Mencukupi Kebutuhan Wilayah

PETA SUB PROSES

PESIBAR -16.01.06

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

PESIBAR -16.01.06.01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan

PESIBAR -16.01.06.02

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

OUTPUT

Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik

INPUT

Meningkatkan Ketersediaan, Cakupan, Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur, Sarana dan Utilitas Wilayah yang Handal, Efektif, Efisien dan Mencukupi Kebutuhan Wilayah

PETA SUB PROSES

PESIBAR – 08.02.01

Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

PESIBAR – 08.02.01.01

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

PESIBAR – 08.02.01.02

Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

PESIBAR – 08.02.01.03

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

PESIBAR – 08.02.01.04

Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

PESIBAR – 08.02.01.05

Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah

PESIBAR – 08.02.01.06

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

OUTPUT

Persentase Gangguan Trantibum Yang Tertangani

INPUT

Meningkatkan Ketersediaan, Cakupan, Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur, Sarana dan Utilitas Wilayah yang Handal, Efektif, Efisien dan Mencukupi Kebutuhan Wilayah

PETA SUB PROSES

PESIBAR – 08.02.02

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

PESIBAR – 08.02.02.01

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

PESIBAR – 08.02.02.02

Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

OUTPUT

Persentase Penegakan Perda Dan Perbub Yang Terlaksana

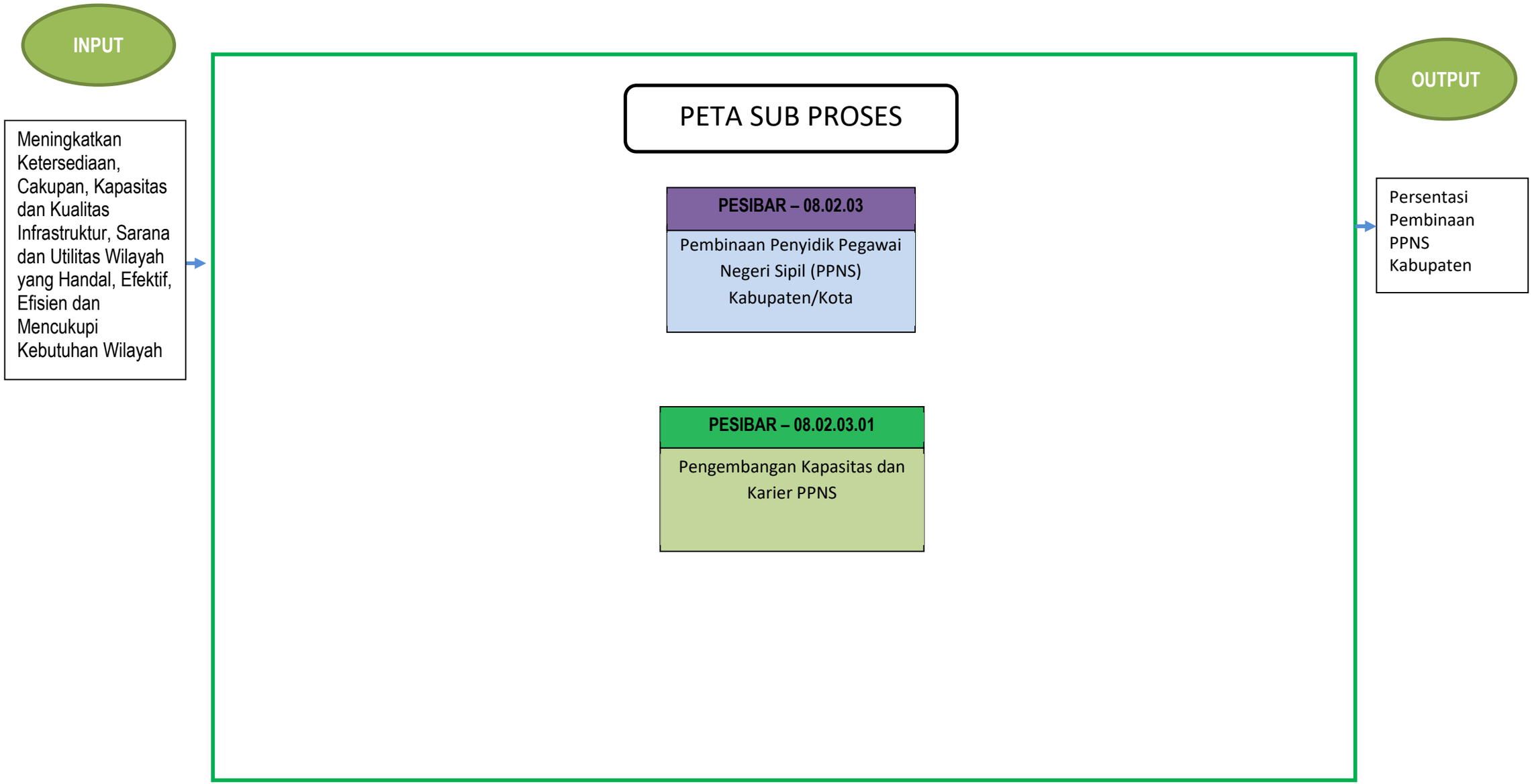
INPUT
Meningkatkan Ketersediaan, Cakupan, Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur, Sarana dan Utilitas Wilayah yang Handal, Efektif, Efisien dan Mencukupi Kebutuhan Wilayah
PETA SUB PROSES
PESIBAR – 08.02.03
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
PESIBAR – 08.02.03.01
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
OUTPUT
Persentasi Pembinaan PPNS Kabupaten

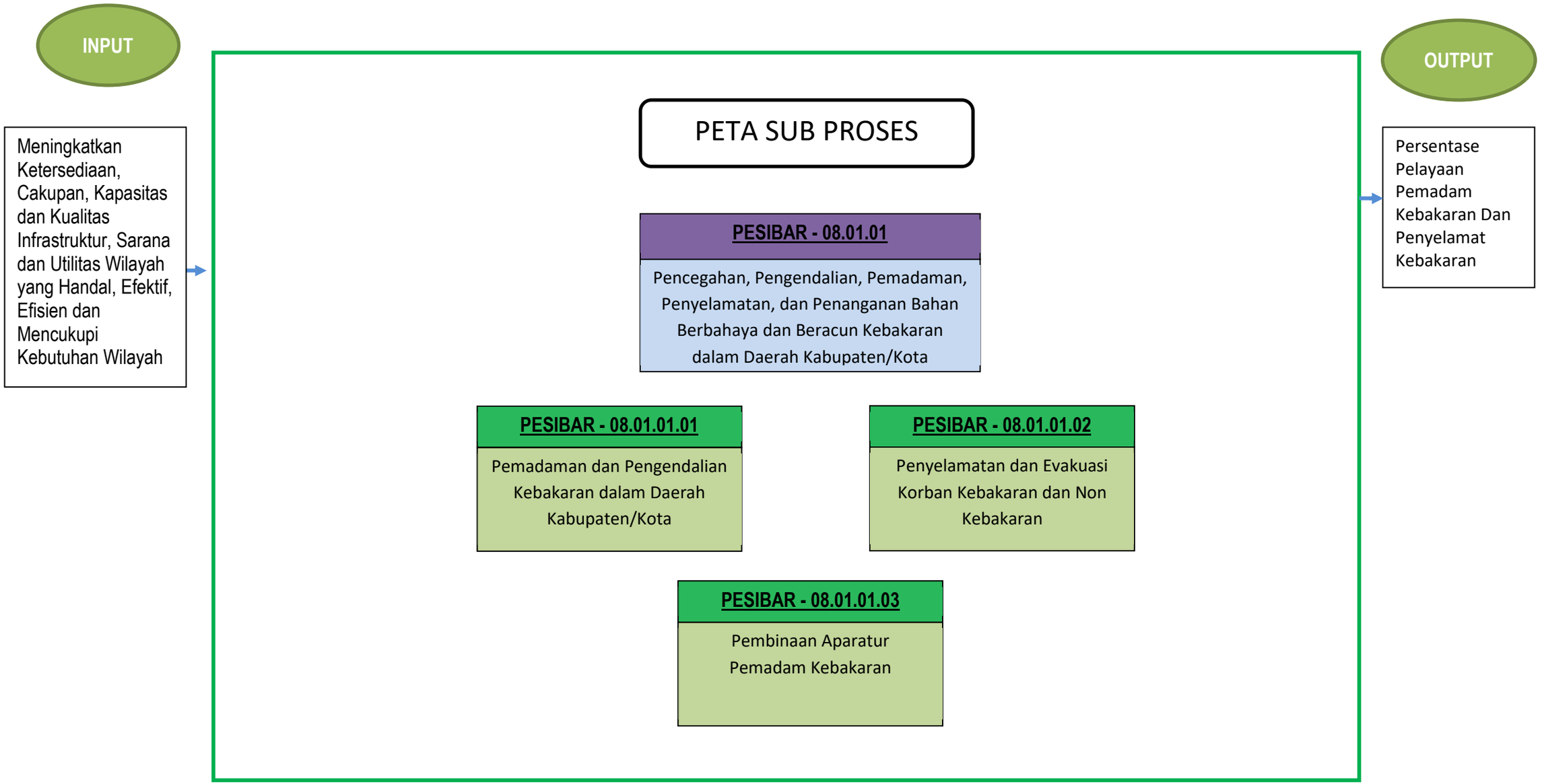
INPUT
Meningkatkan Ketersediaan, Cakupan, Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur, Sarana dan Utilitas Wilayah yang Handal, Efektif, Efisien dan Mencukupi Kebutuhan Wilayah
PETA SUB PROSES
PESIBAR - 08.01.01
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
PESIBAR - 08.01.01.01
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
PESIBAR - 08.01.01.02
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
PESIBAR - 08.01.01.03
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
OUTPUT
Persentase Pelayaan Pemadam Kebakaran Dan Penyelamat Kebakaran

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
PESIBAR -16.01.01.01

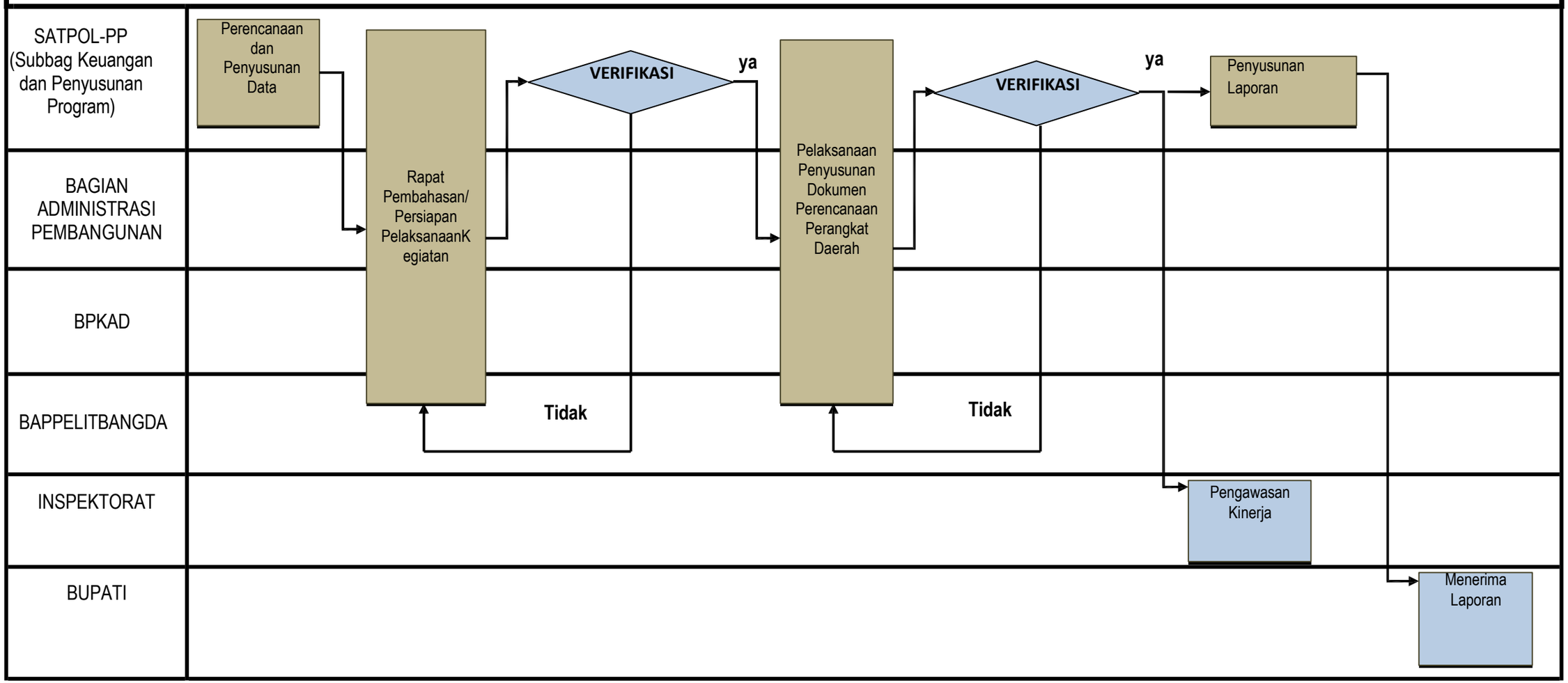

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

PESIBAR -16.01.01.01.01

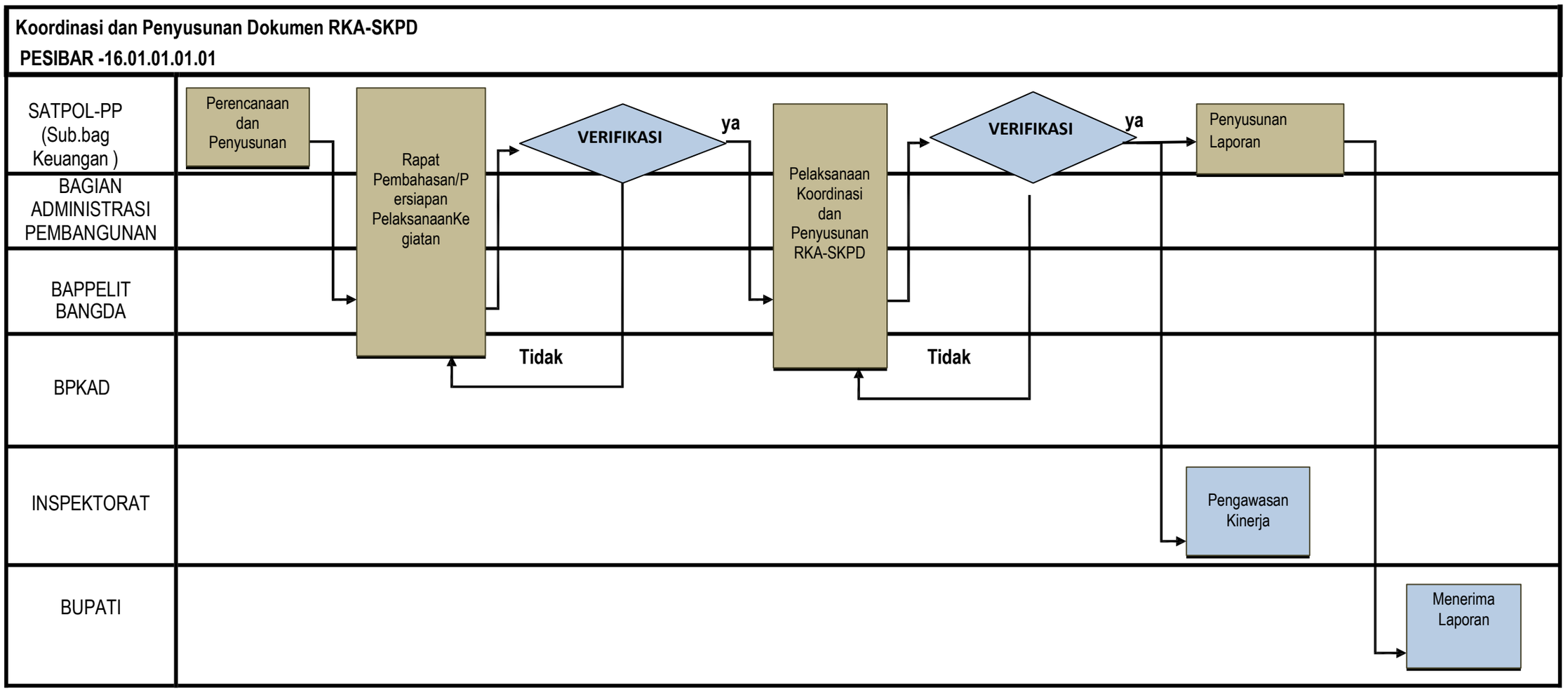

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
(PESIBAR -16.01.01.01.02)

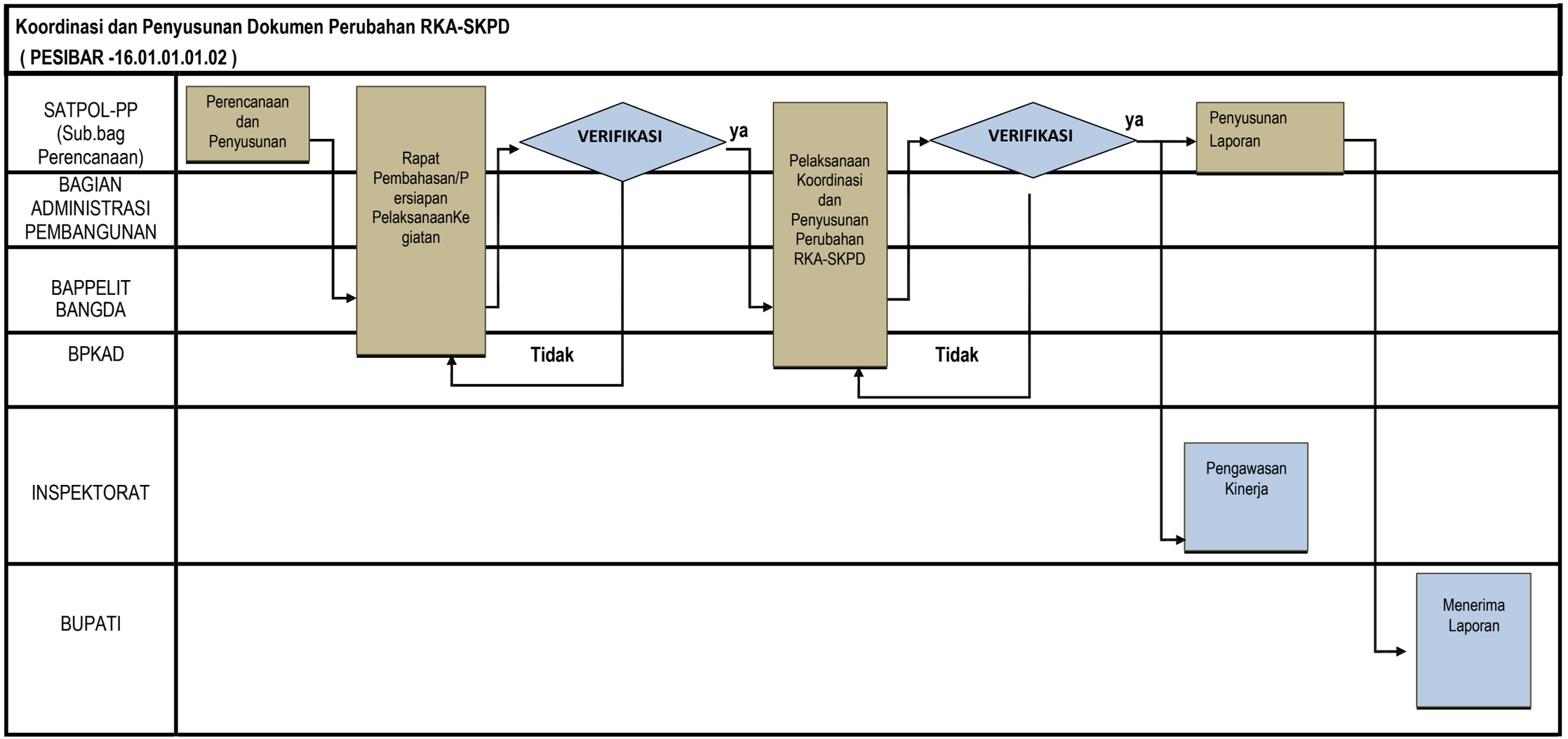

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
(PESIBAR -16.01.01.01.03)

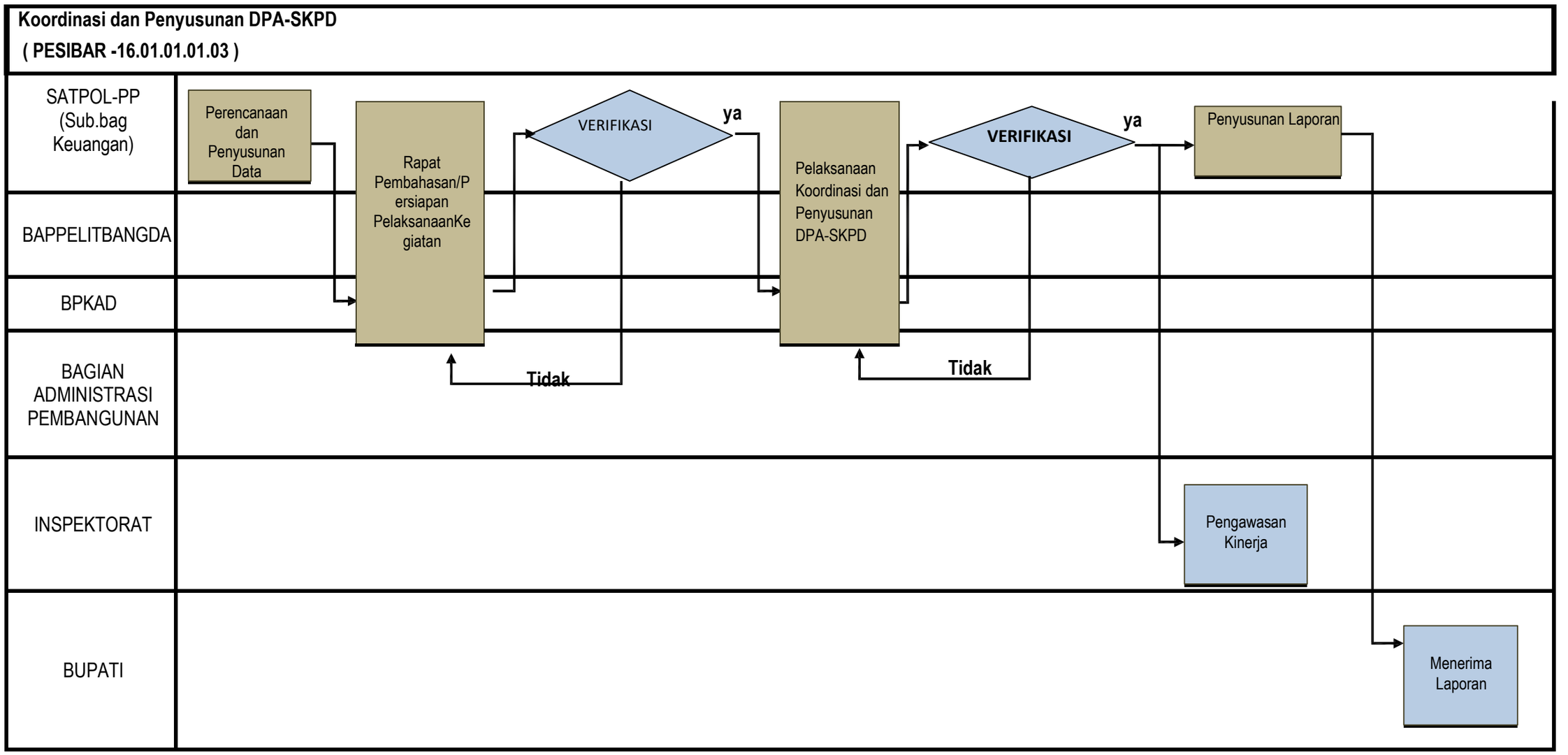

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
(PESIBAR -16.01.01.01.04)

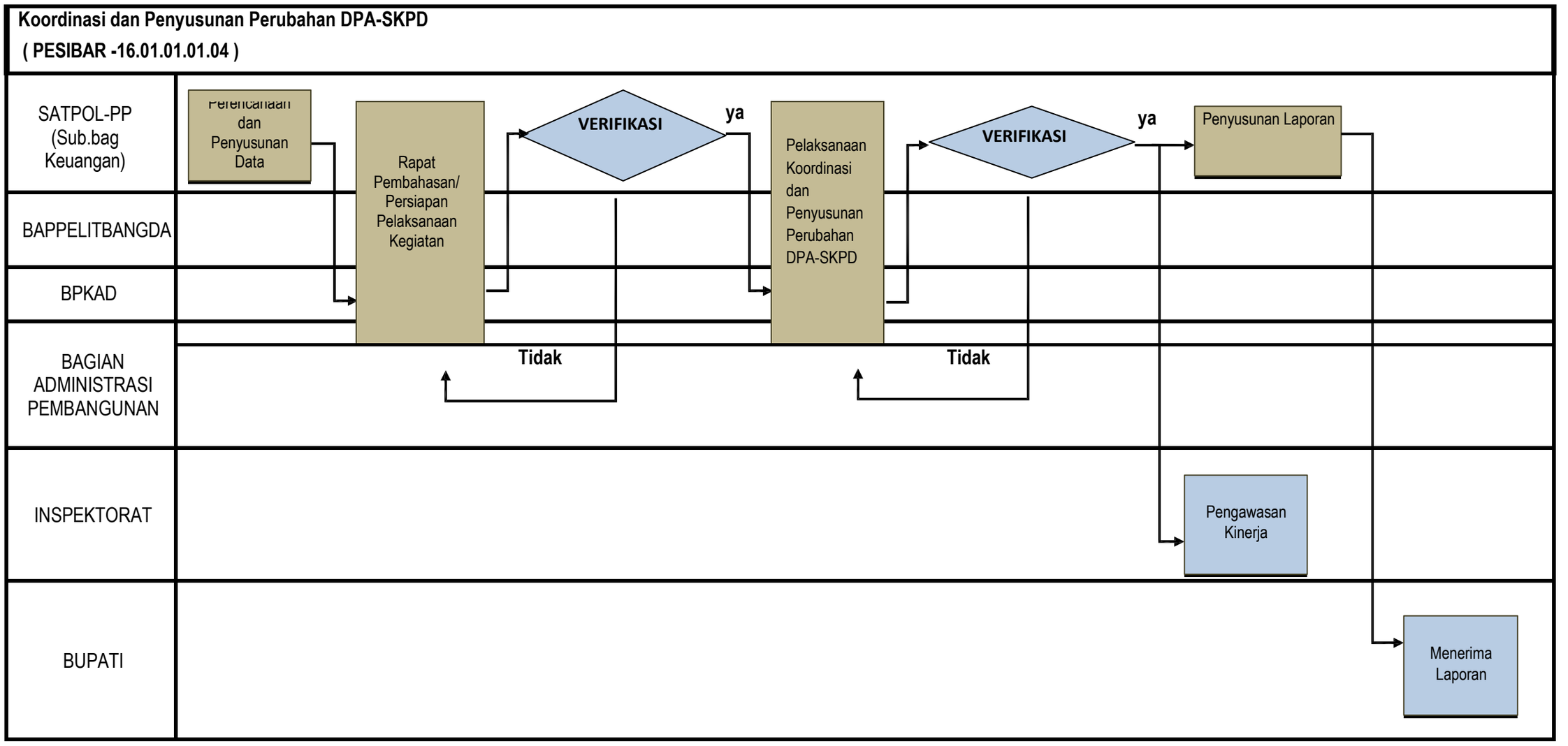

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
(PESIBAR -16.01.01.01.05)

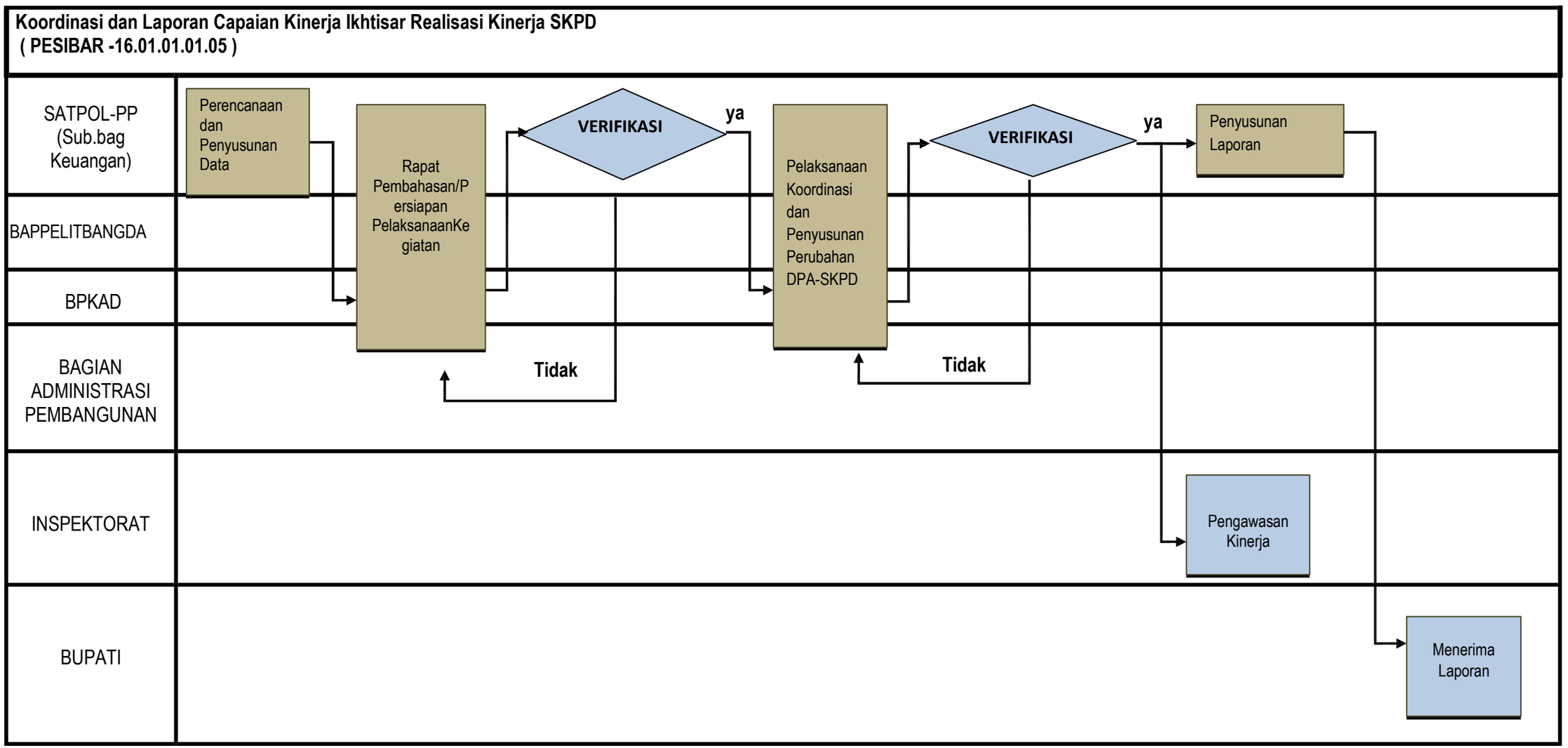

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR BARAT

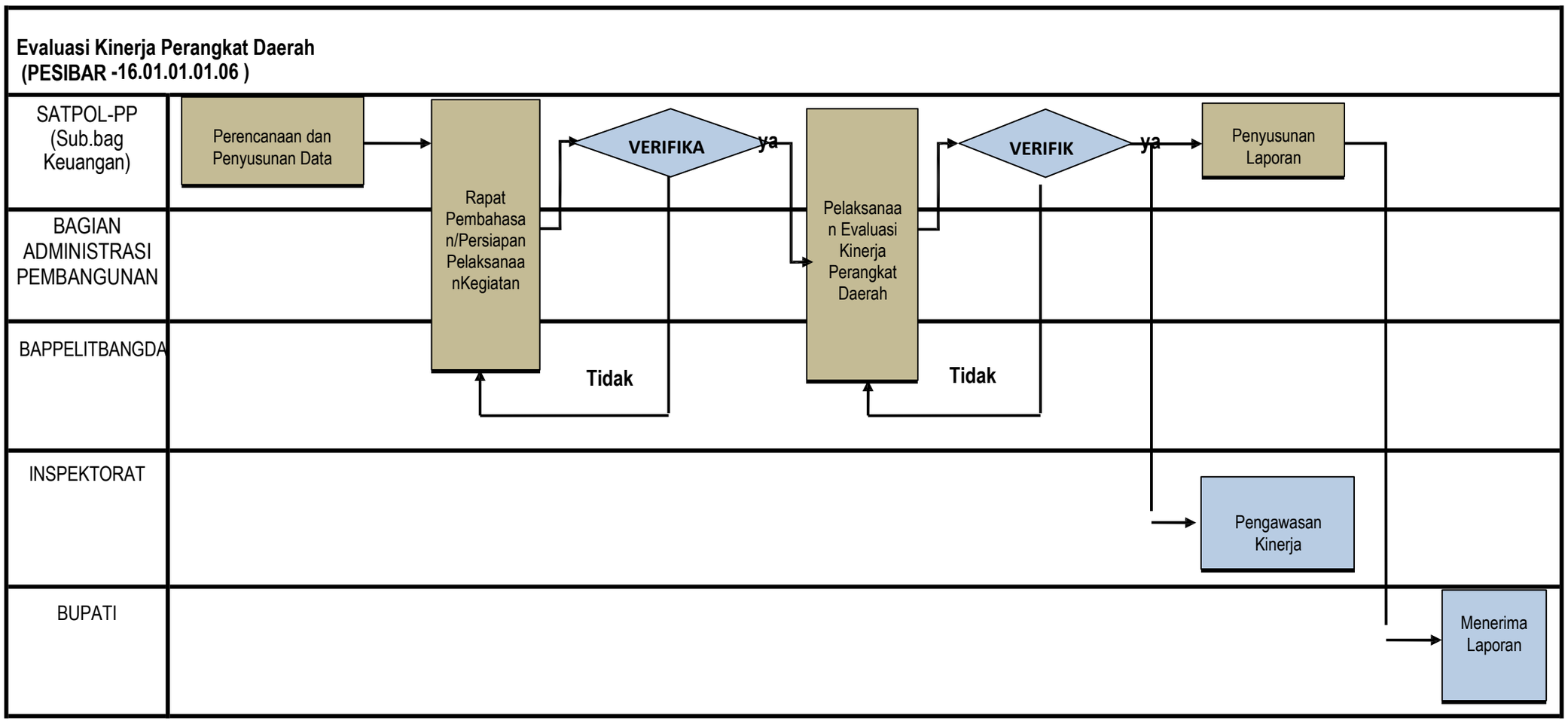

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
(PESIBAR -16.01.02.01)

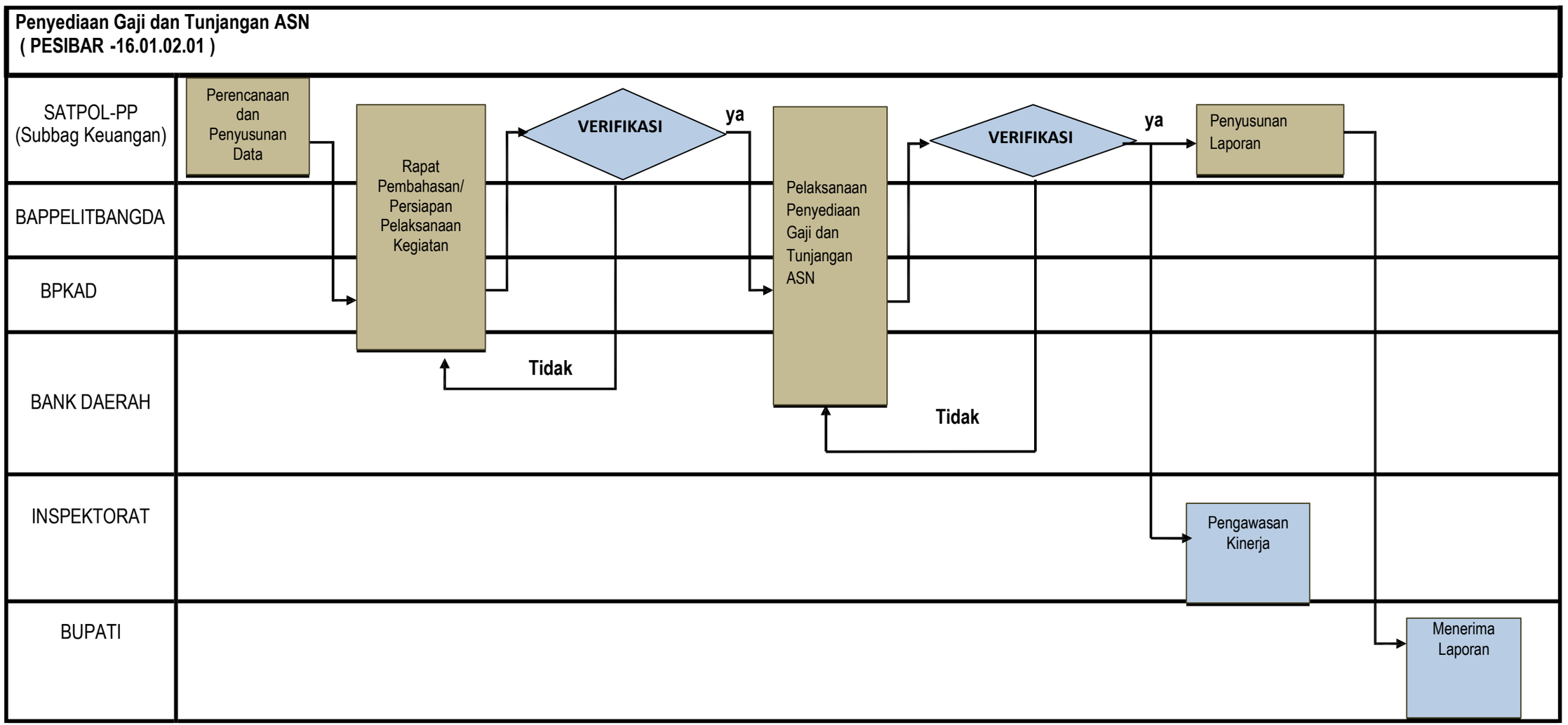

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD
(PESIBAR -16.01.02.02)

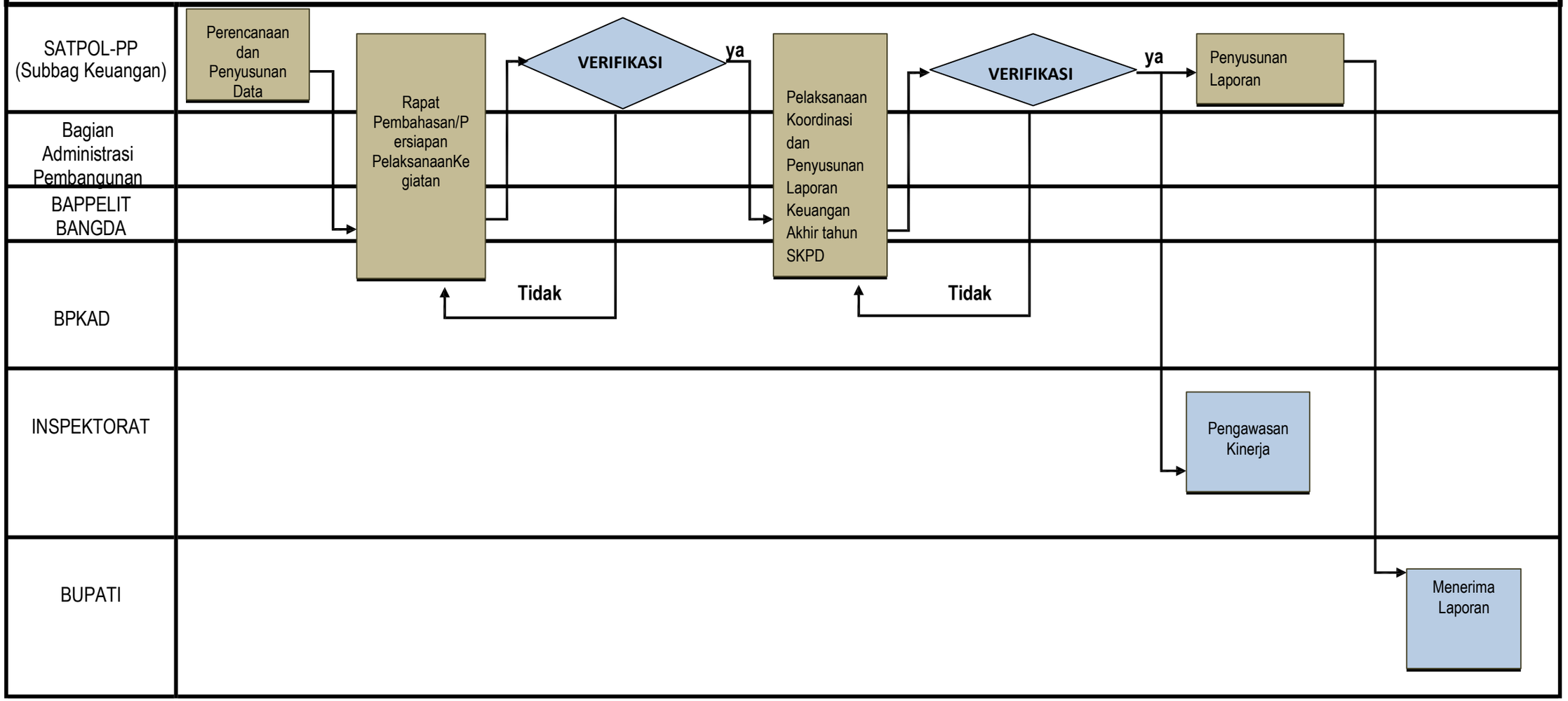

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
(PESIBAR -16.01.02.03)

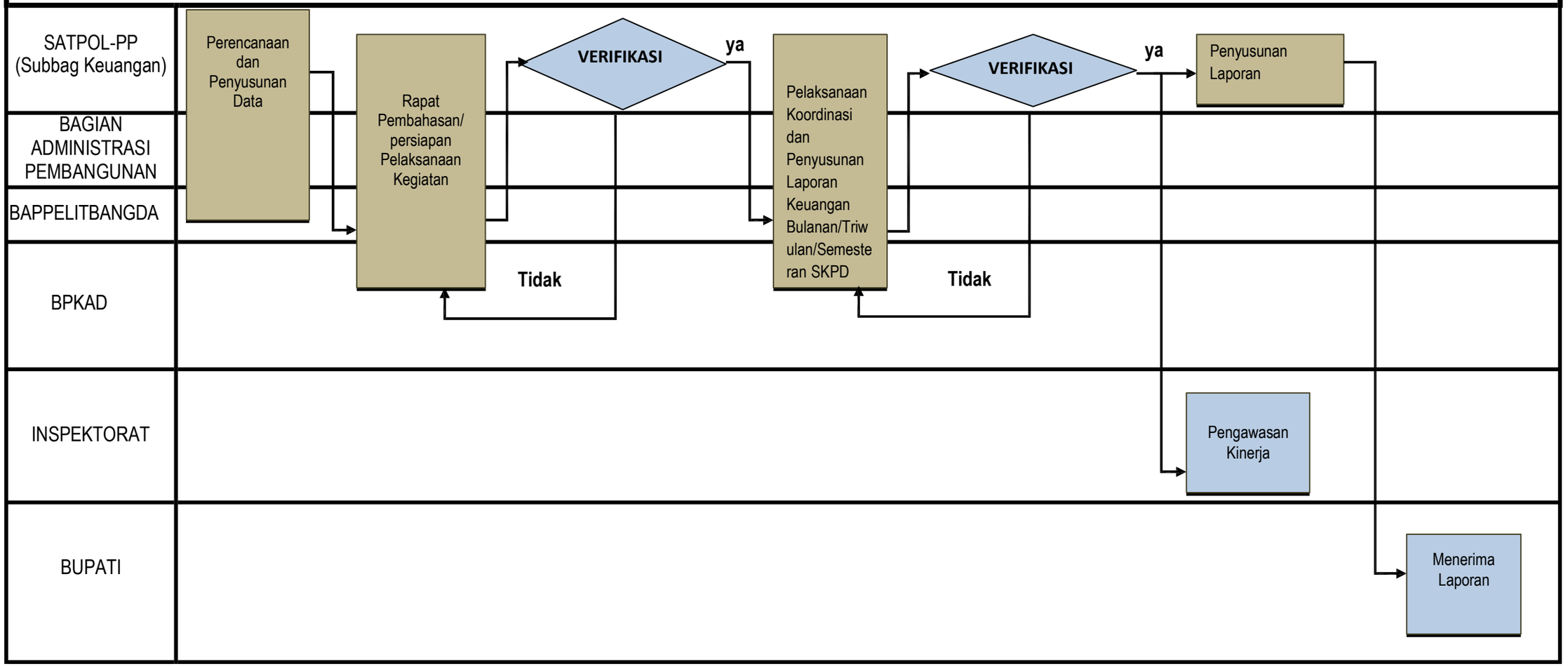

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
(PESIBAR -16.01.02.04)

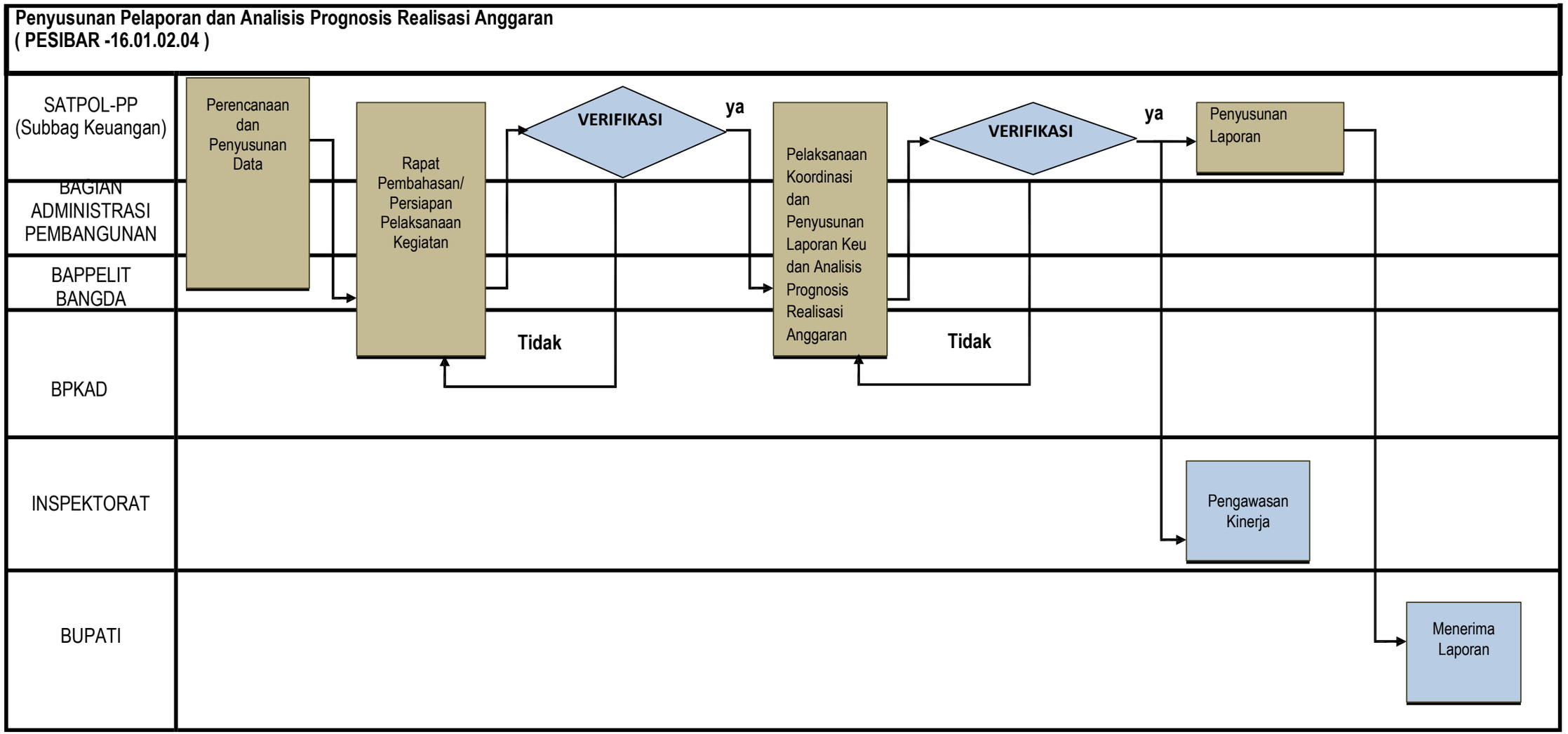

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
(PESIBAR -16.01.03.01)

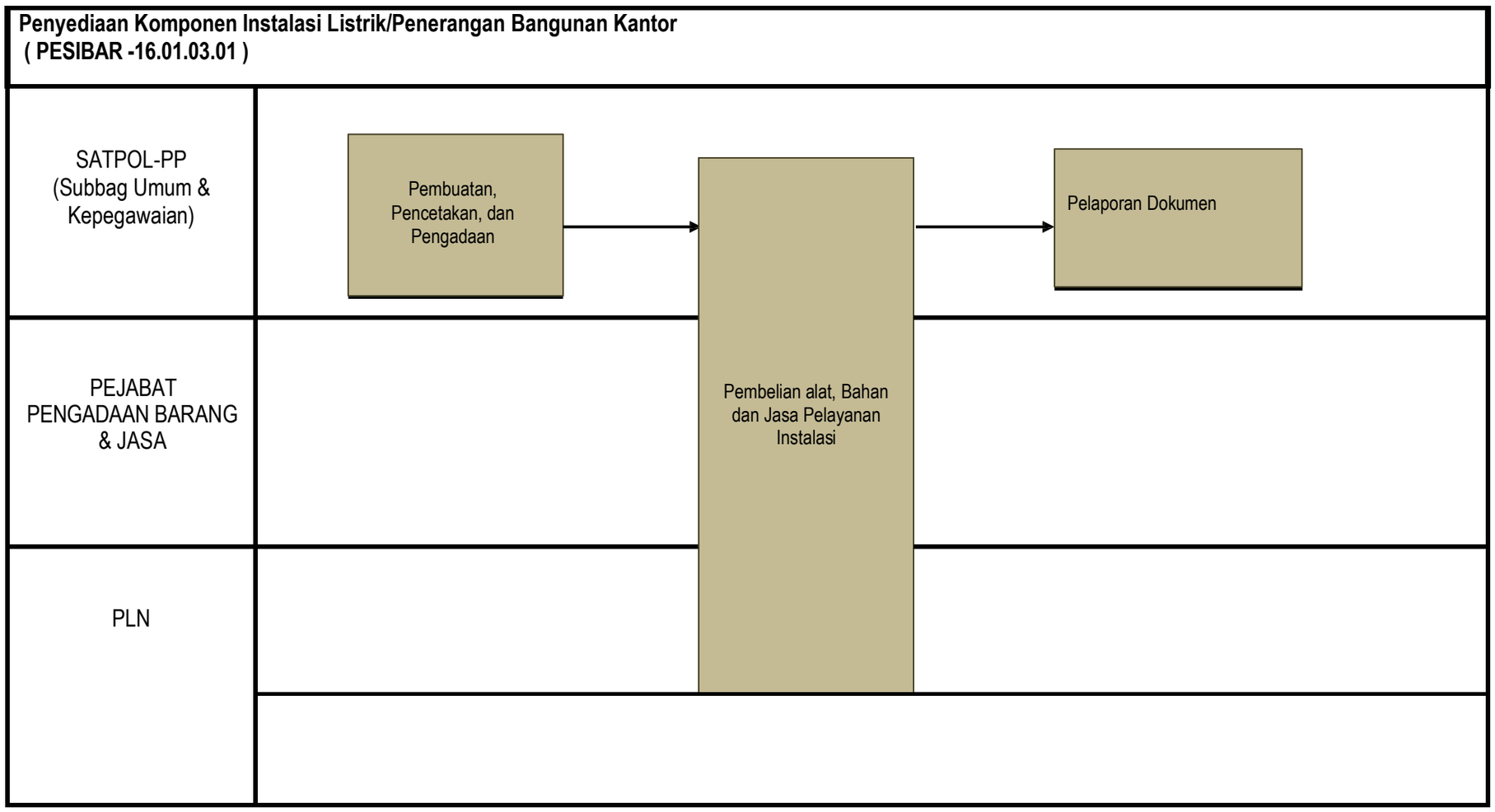

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
(PESIBAR -16.01.03.03)

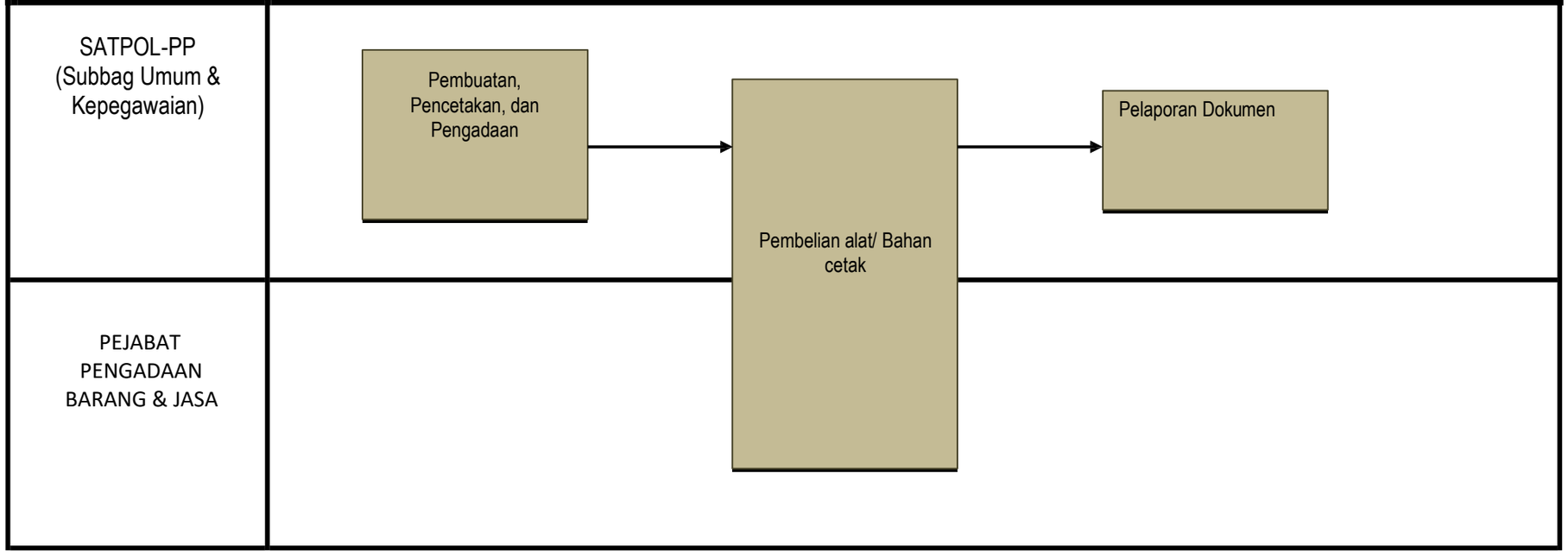

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PESISIR BARAT

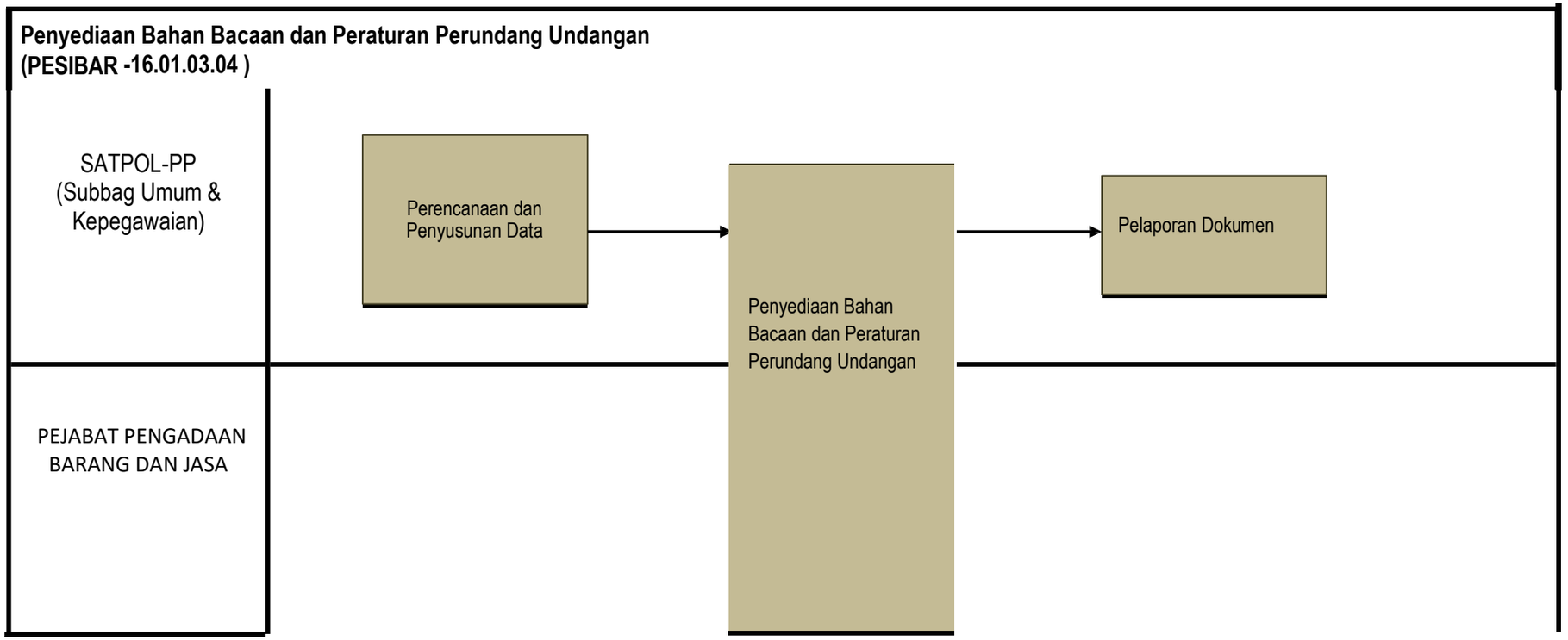

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Fasilitasi Kunjungan Tamu
(PESIBAR -16.01.03.05)

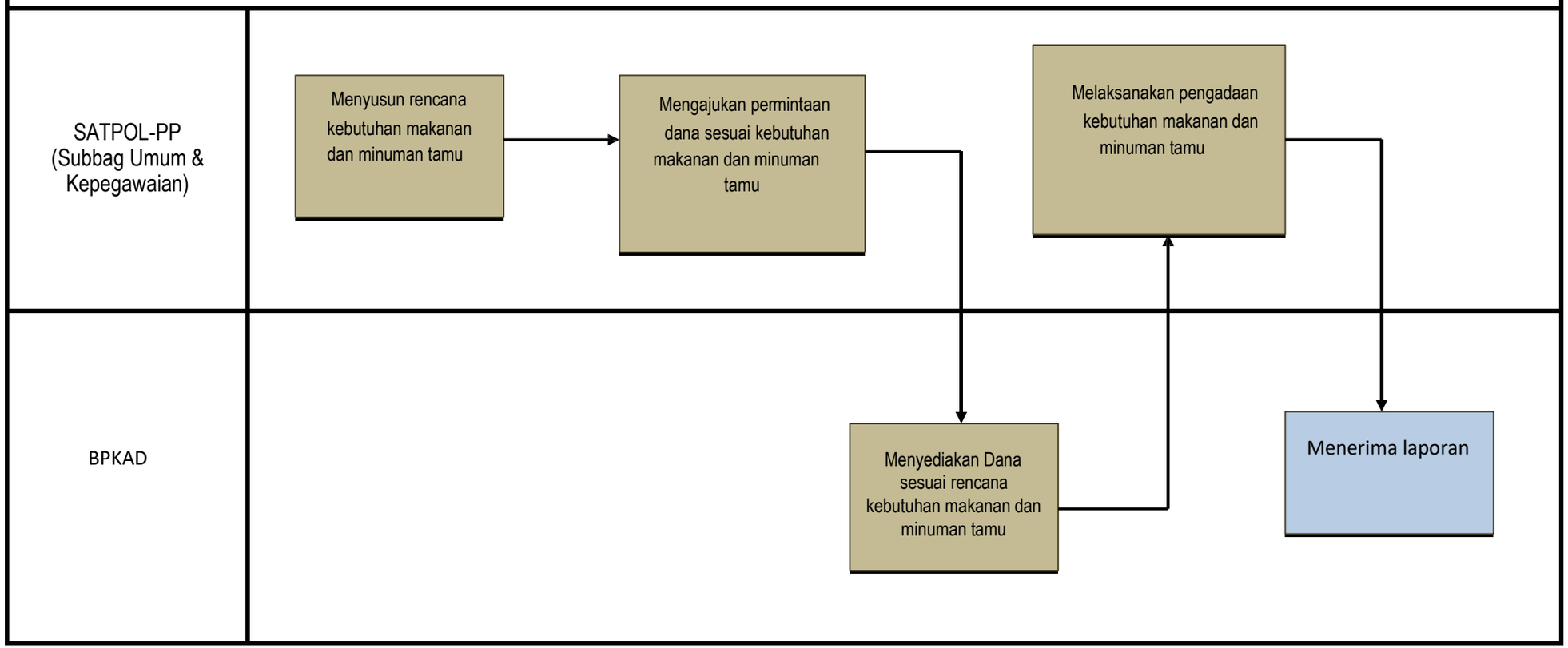

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
(PESIBAR -16.01.03.06)

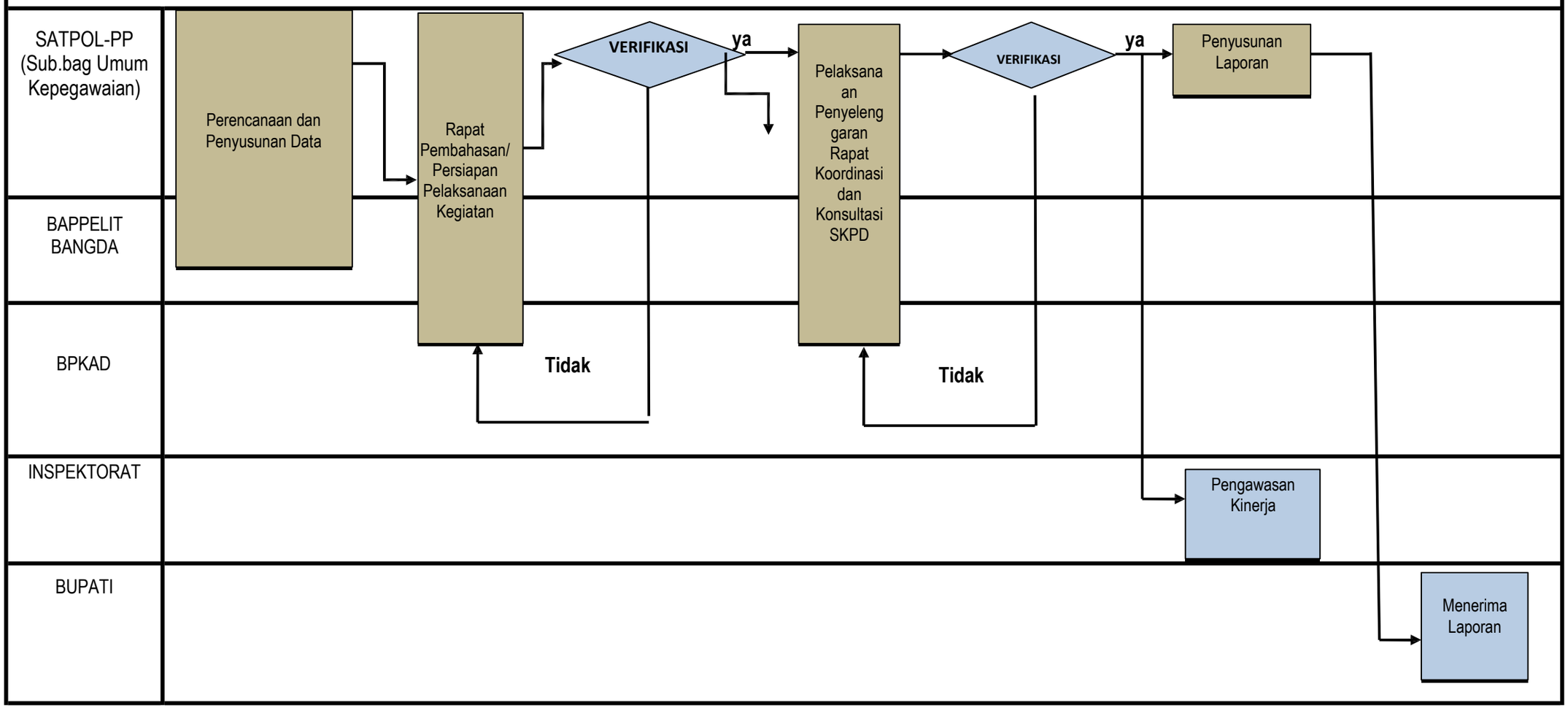

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Pengadaan Mebel
(PESIBAR -16.01.04.01)

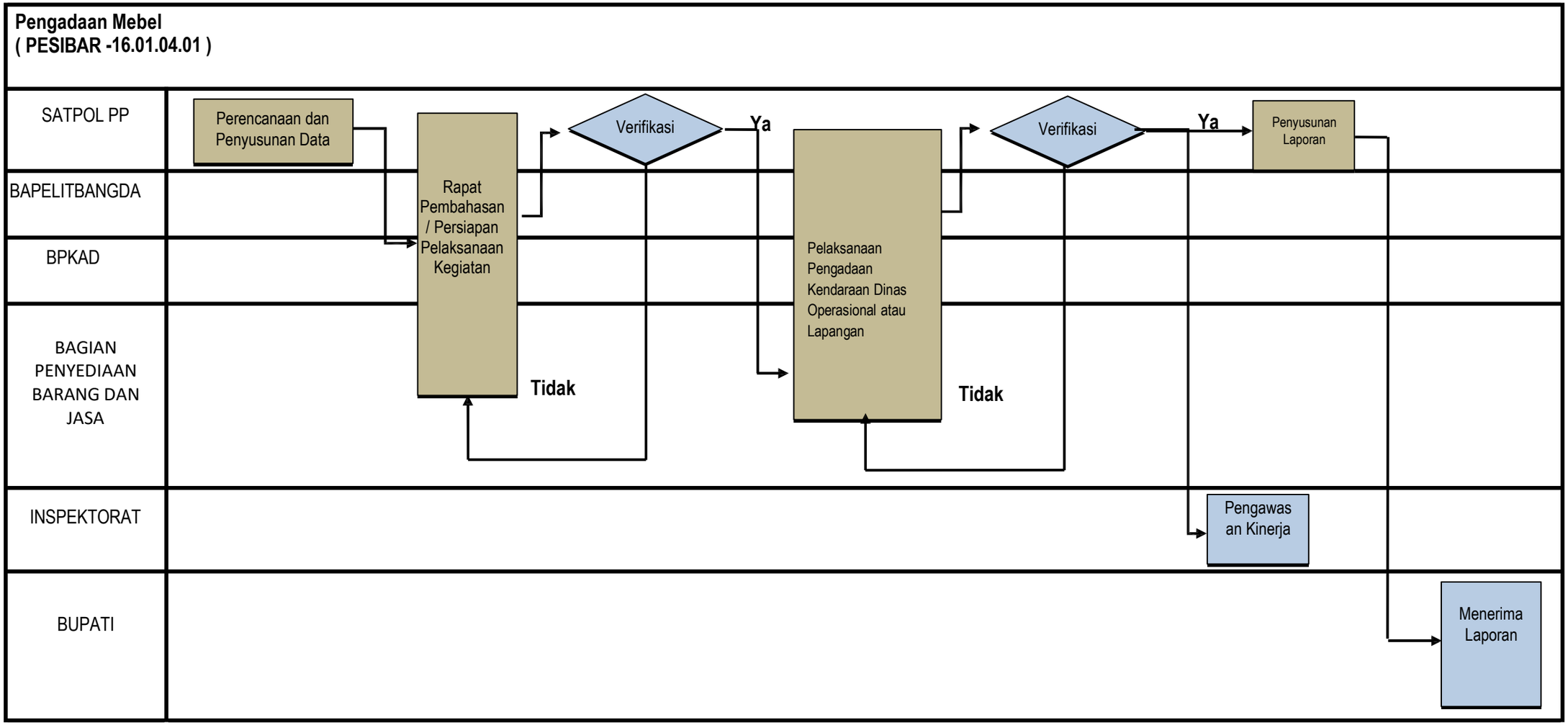

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(PESIBAR -16.01.05.01)

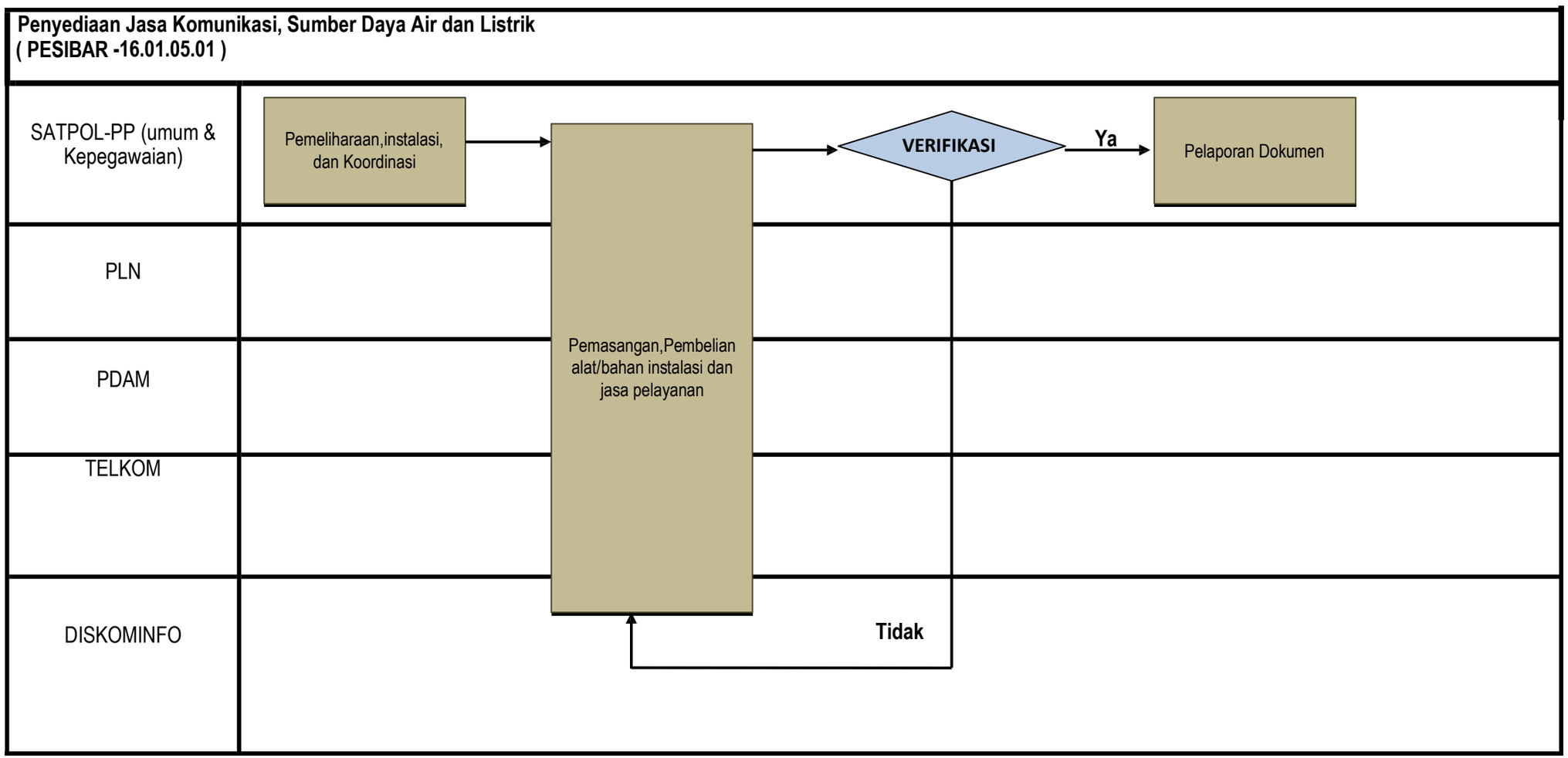

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
(PESIBAR -16.01.05.03)

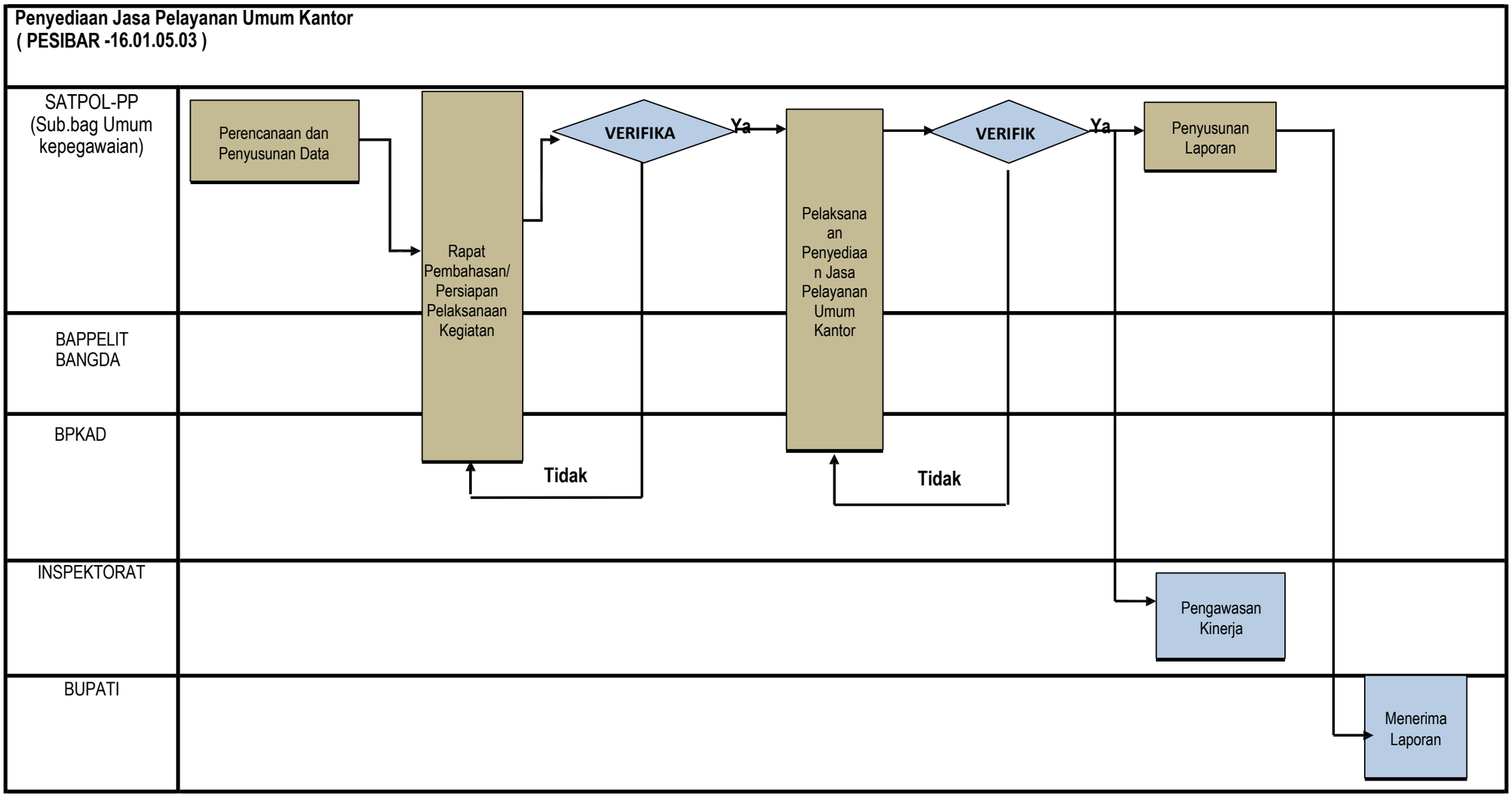

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR BARAT

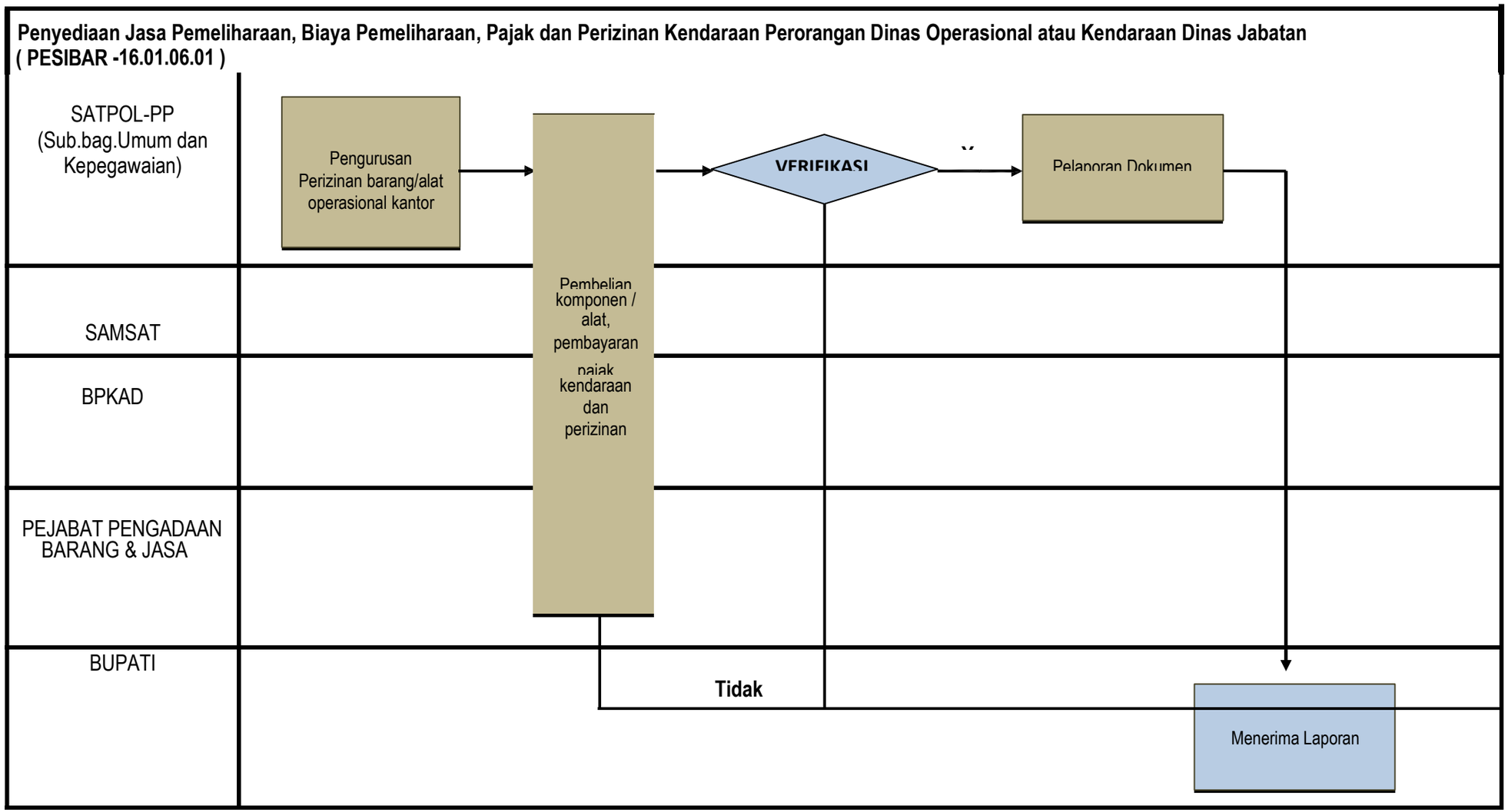

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR BARAT

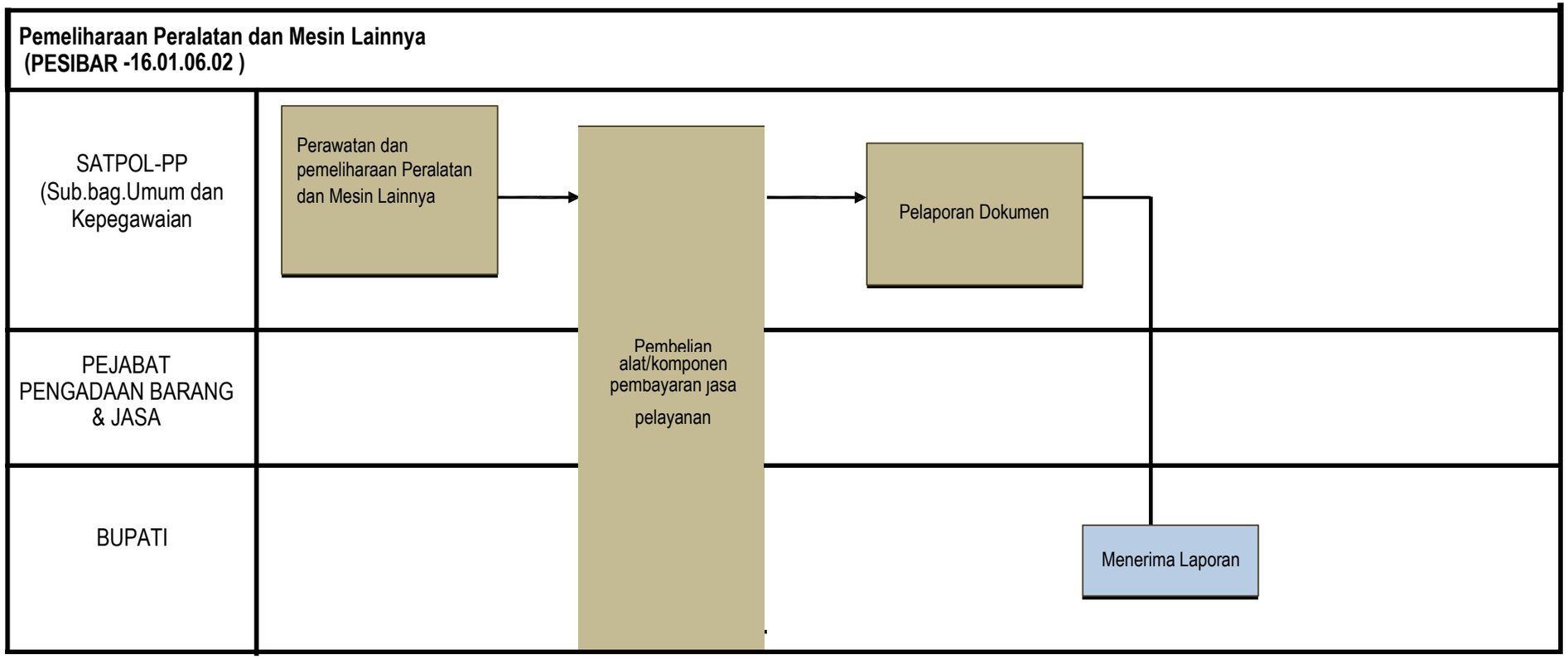

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PESISIR BARAT

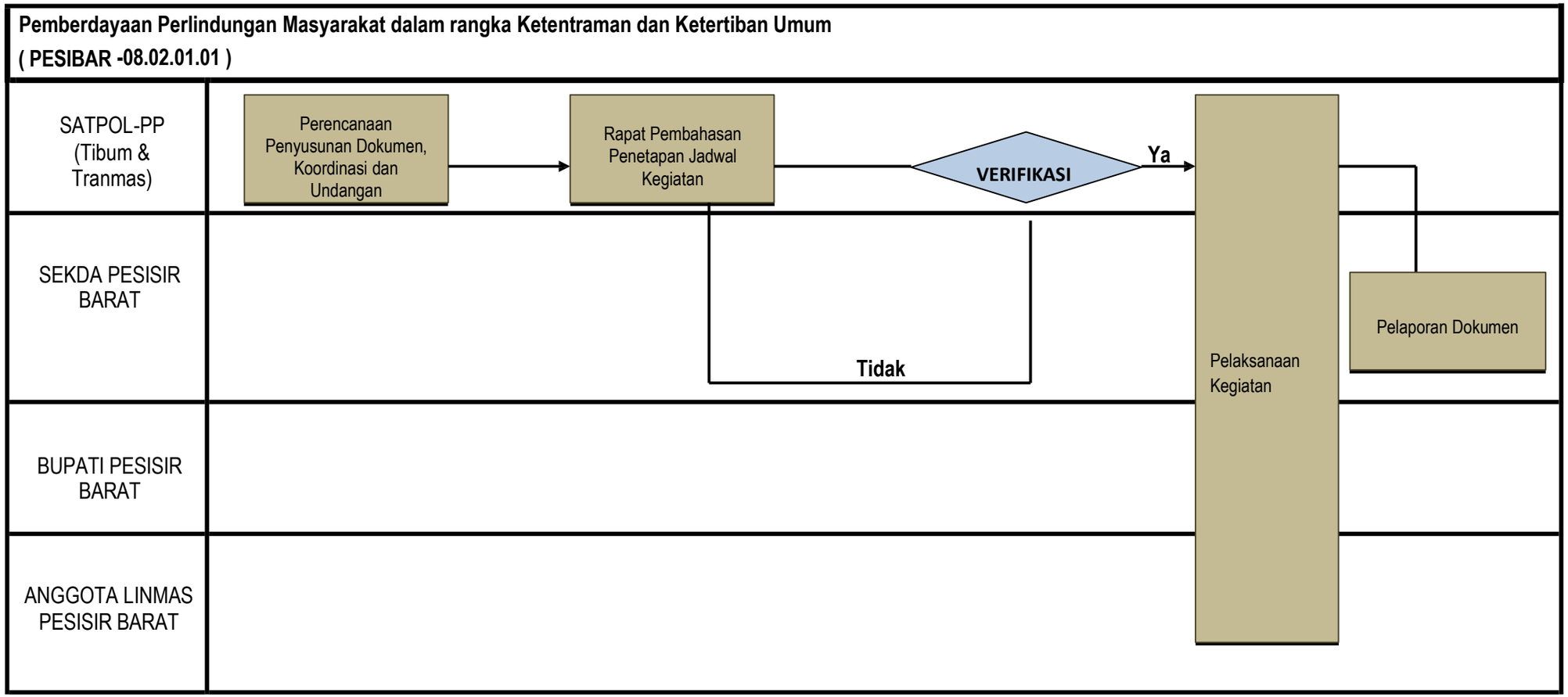

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR BARAT

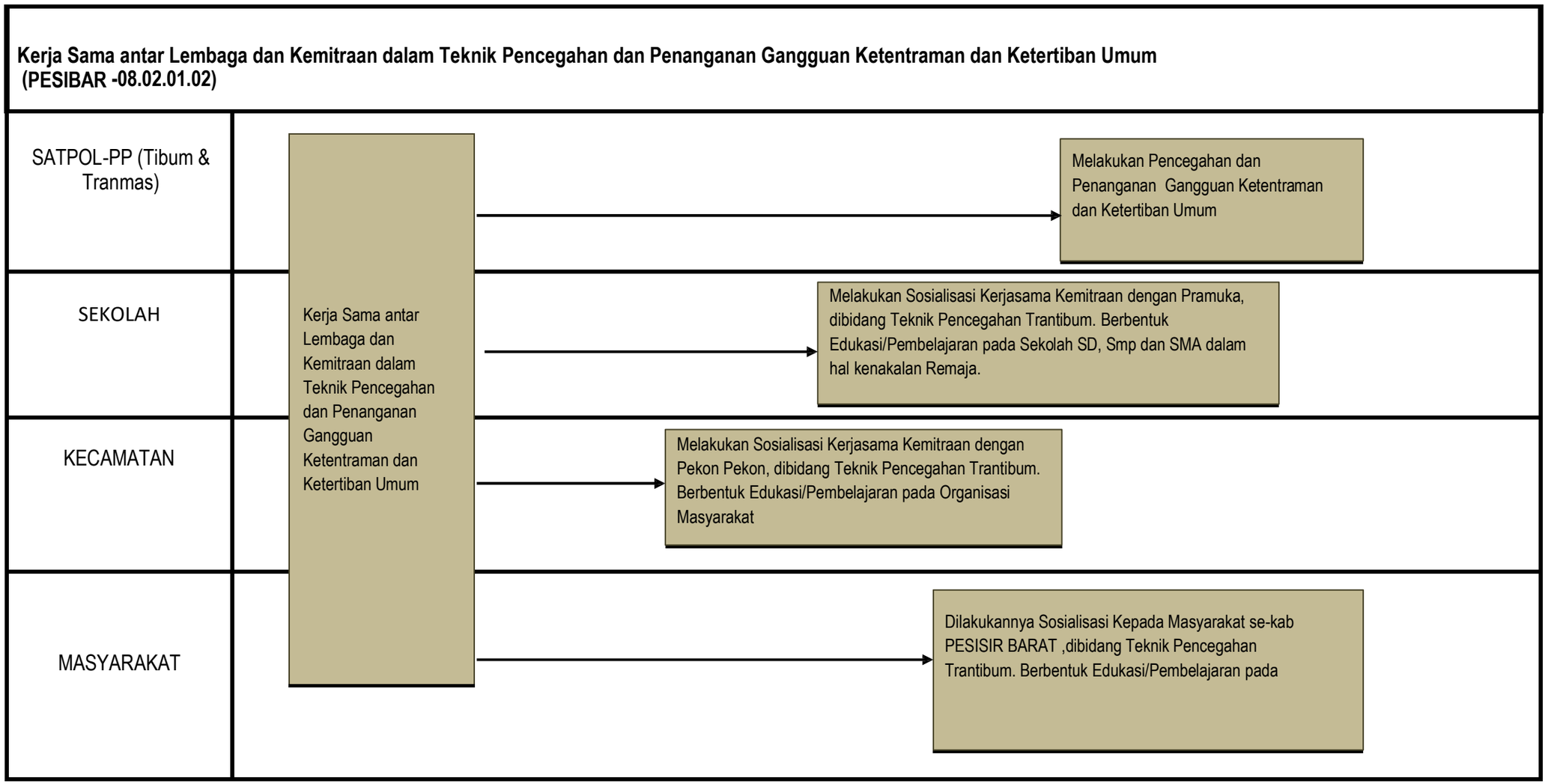

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
(PESIBAR -08.02.01.03)

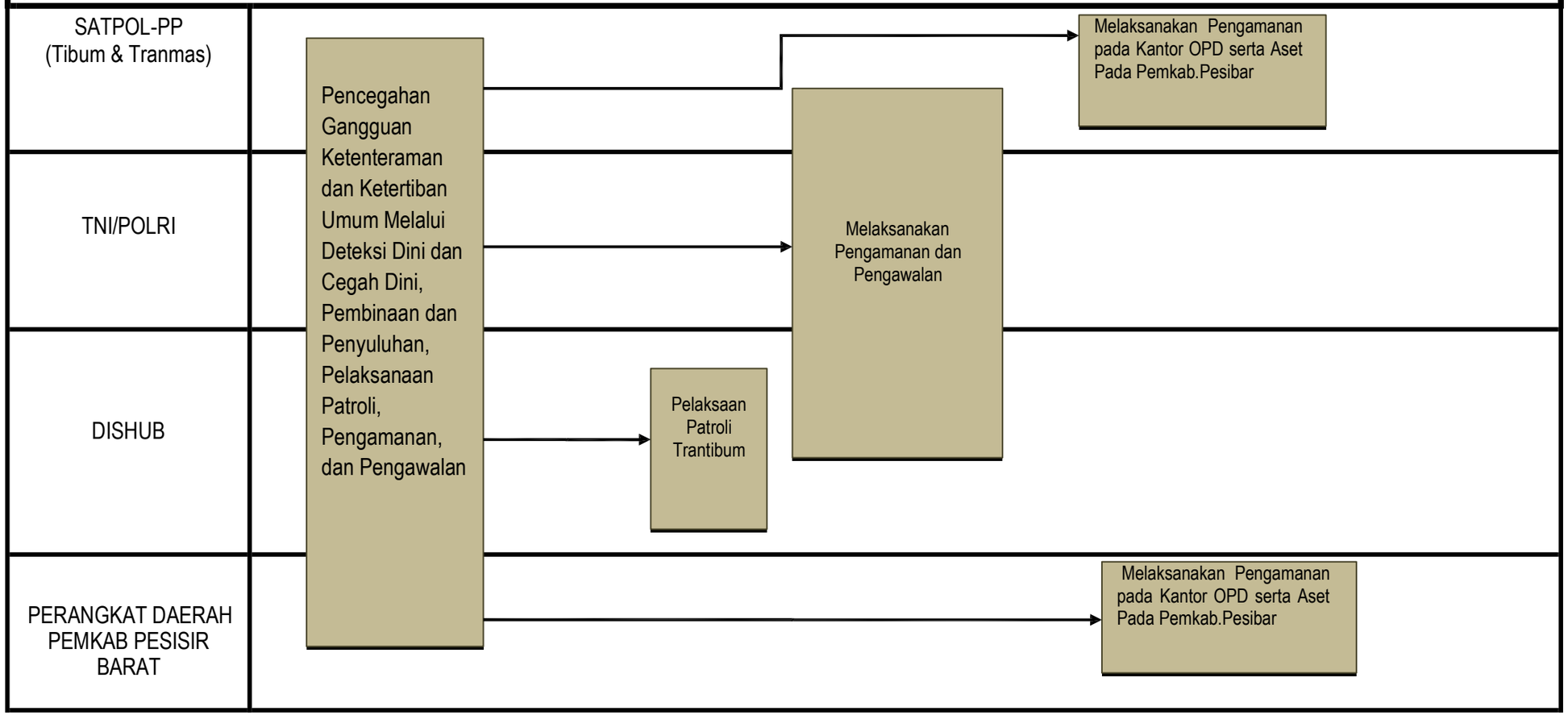

Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
PESIBAR – 08.02.01.04

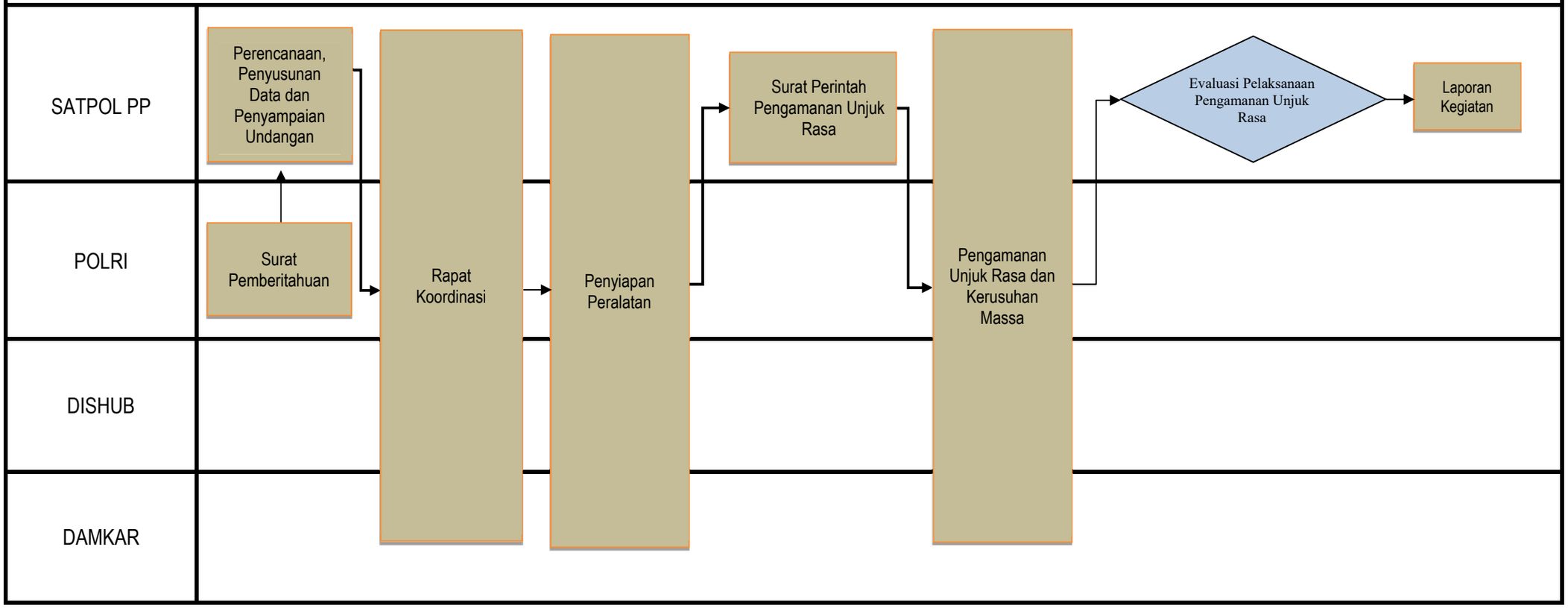

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
(PESIBAR -08.02.02.01)

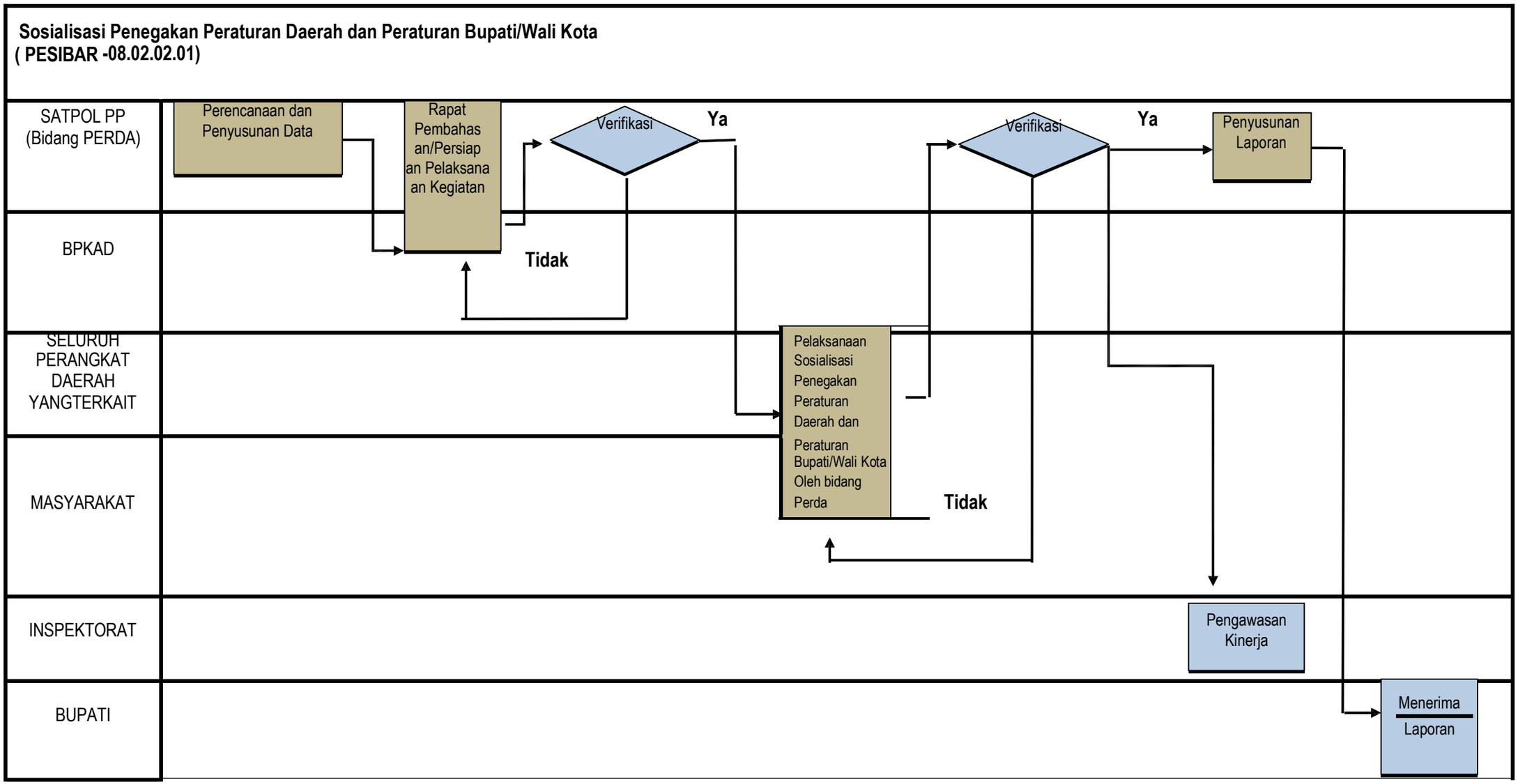

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
(PESIBAR -08.02.02.02)

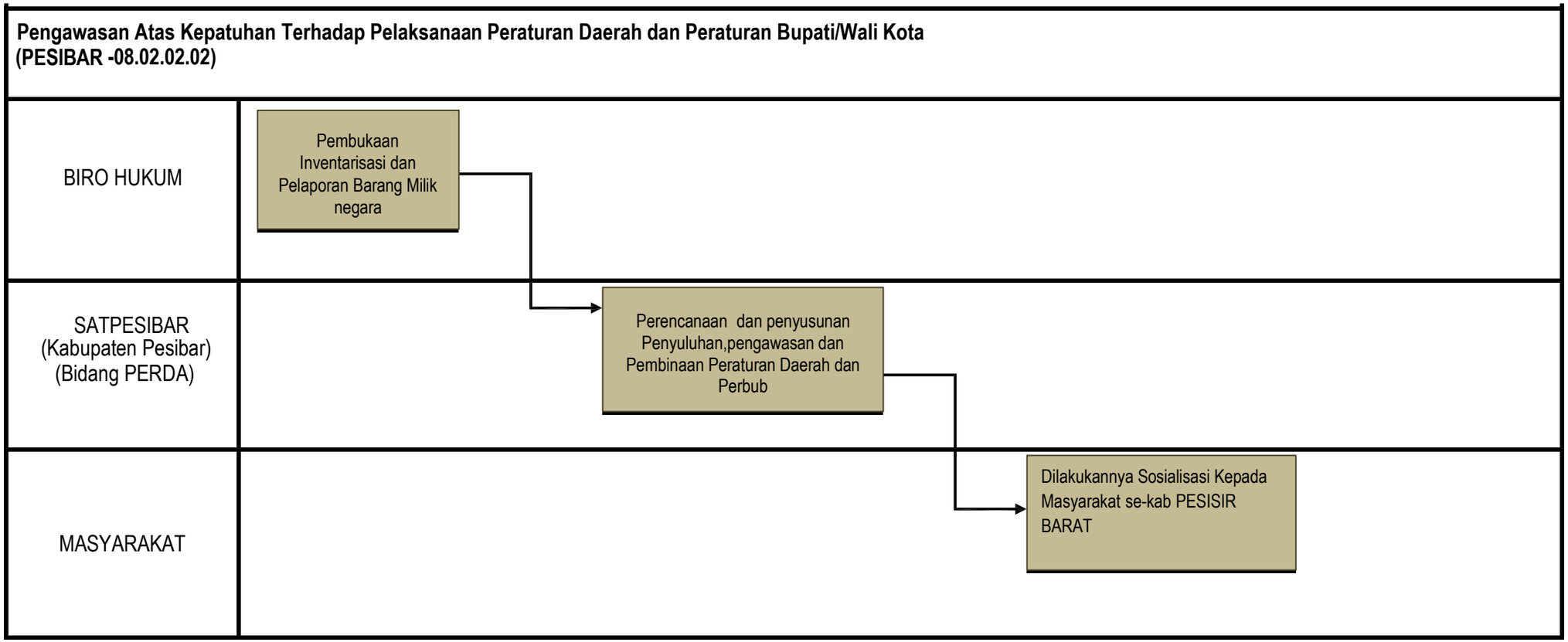

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
PESIBAR – 08.02.03.01

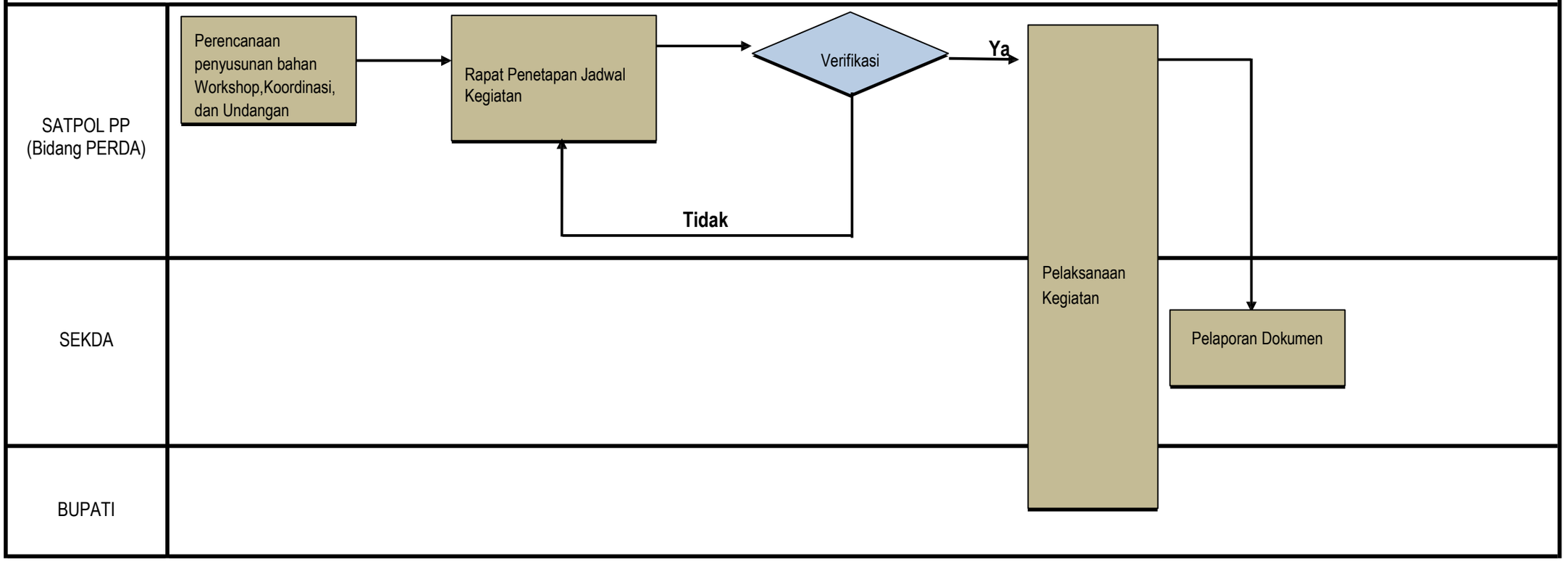

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
PESIBAR – 08.01.01.01

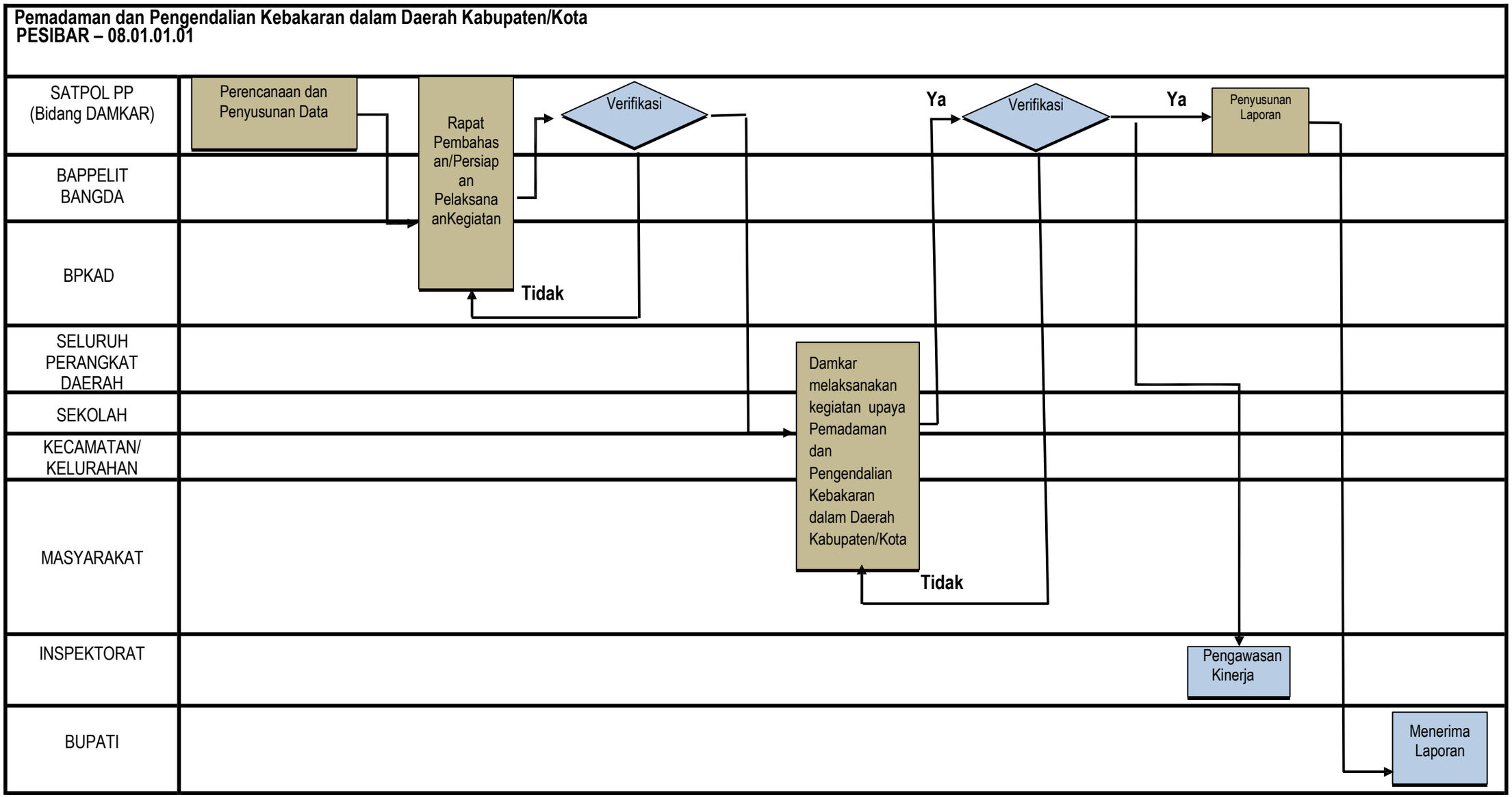

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PESISIR BARAT

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
PESIBAR – 08.01.01.02

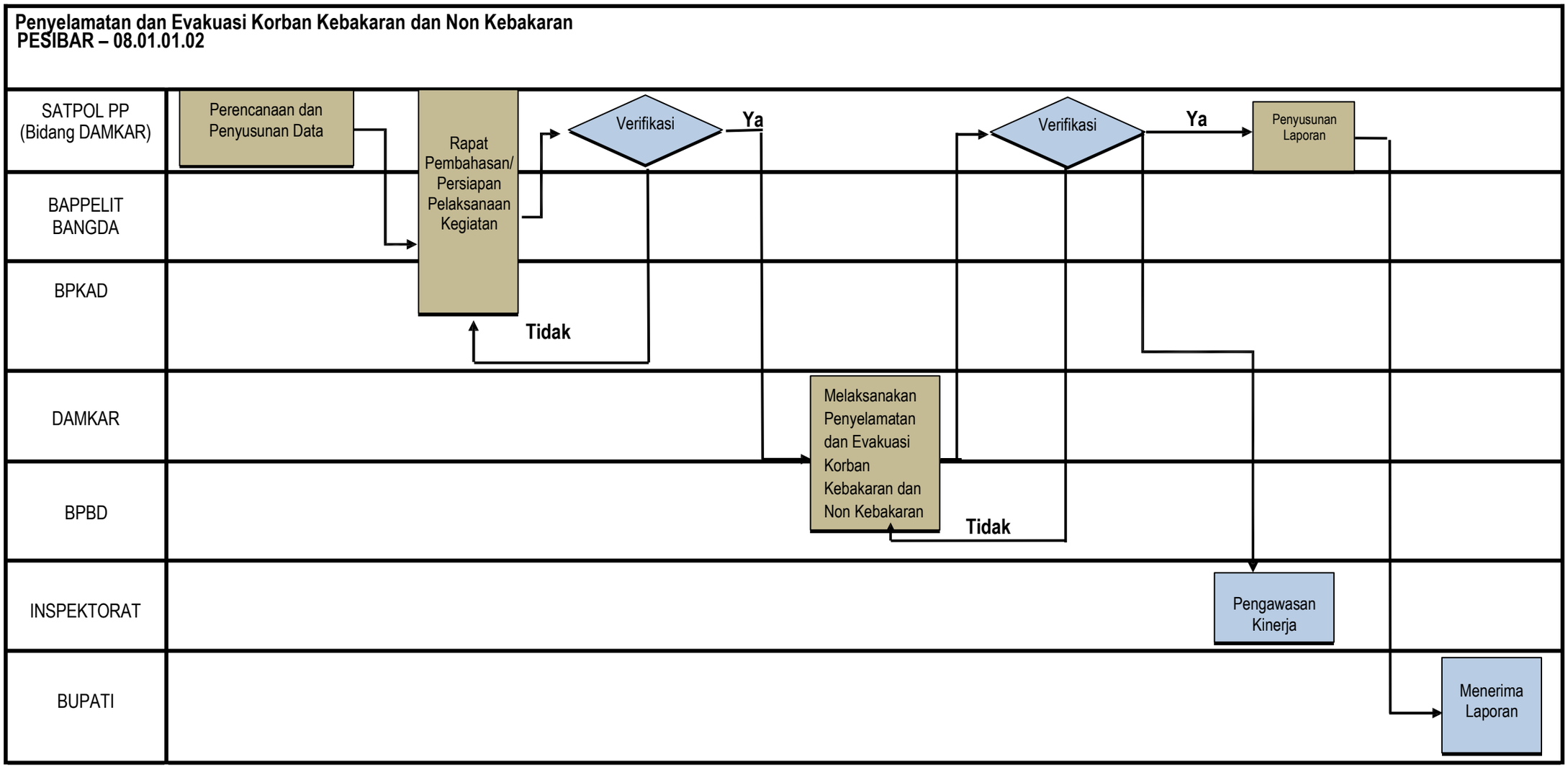

PETA PROSES BISNIS (SUB PROSES)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN PESISIR BARAT

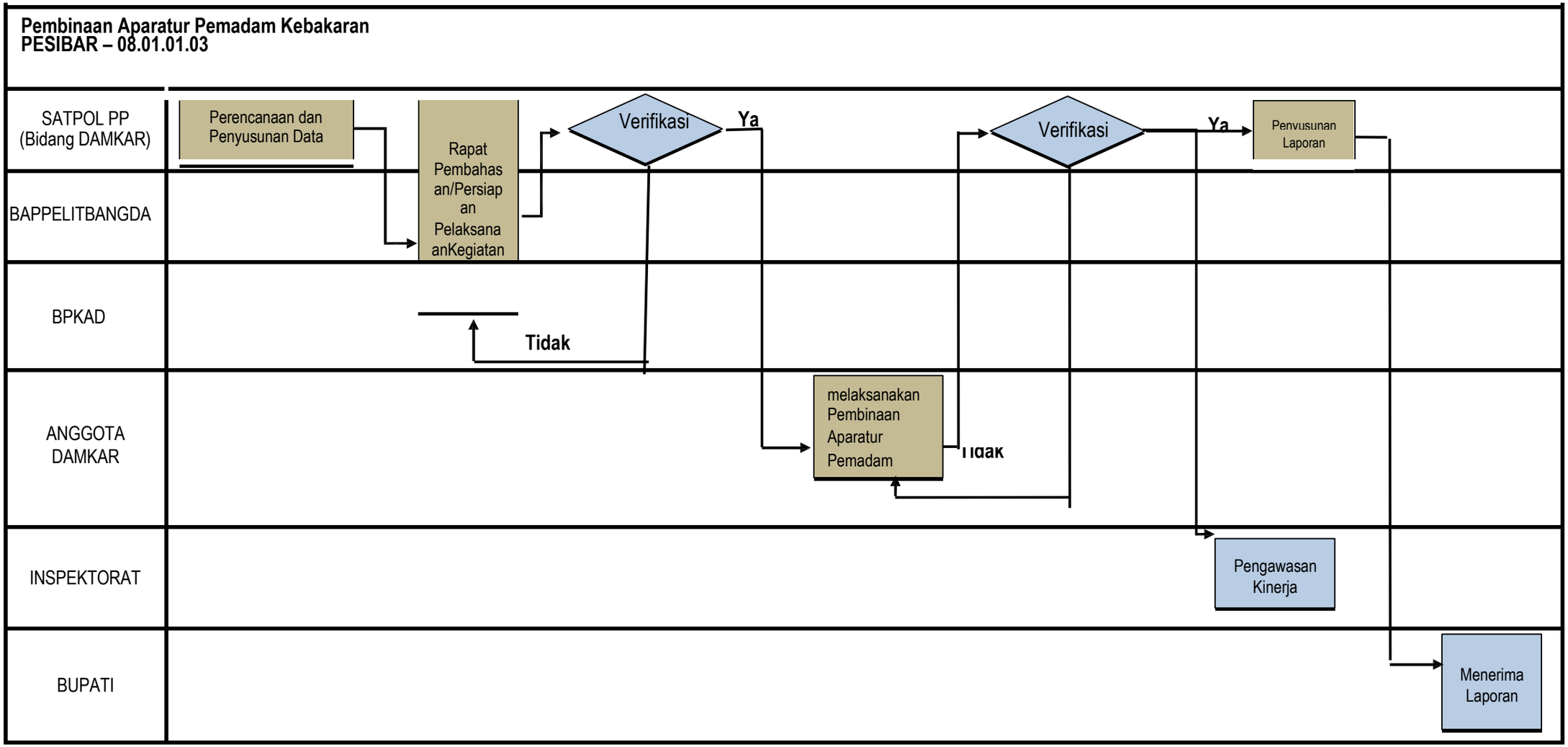

PETA RELASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
PESIBAR-16.01.01

1. Satpop PP (Subbag Keuangan dan Penyusunan Program)
2. Bagian Administrasi Pembangunan
3. BPKAD
4. BAPPELITBANGDA
5. Inspektorat
6. BUPATI

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
PESIBAR-16.01.01.01

1. Satpop PP (Subbag Keuangan dan Penyusunan Program)
2. Bagian Administrasi Pembangunan
3. BPKAD
4. BAPPELITBANGDA
5. Inspektorat
6. BUPATI

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
PESIBAR -16.01.01.01.01

1. Satpop PP (Subbag Keuangan dan Penyusunan Program)
2. Bagian Administrasi Pembangunan
3. BPKAD
4. BAPPELITBANGDA
5. Inspektorat
6. BUPATI

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
PESIBAR -16.01.01.01.02

1. Satpop PP (Subbag Keuangan dan Penyusunan Program)
2. Bagian Administrasi Pembangunan
3. BPKAD
4. BAPPELITBANGDA
5. Inspektorat
6. BUPATI

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
PESIBAR -16.01.01.01.03

1. Satpop PP (Subbag Keuangan dan Penyusunan Program)
2. Bagian Administrasi Pembangunan
3. BPKAD
4. BAPPELITBANGDA
5. Inspektorat
6. BUPATI

Koordinasi dan Penyusunan PERUBAHAN DPA-SKPD
PESIBAR -16.01.01.01.04

1. Satpop PP (Subbag Keuangan dan Penyusunan Program)
2. Bagian Administrasi Pembangunan
3. BPKAD
4. BAPPELITBANGDA
5. Inspektorat
6. BUPATI

Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PESIBAR -16.01.01.01.05

1. Satpop PP (Subbag Keuangan dan Penyusunan Program)
2. Bagian Administrasi Pembangunan
3. BPKAD
4. BAPPELITBANGDA
5. Inspektorat
6. BUPATI

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
PESIBAR -16.01.01.01.06

1. Satpop PP (Subbag Keuangan dan Penyusunan Program)
2. Bagian Administrasi Pembangunan
3. BPKAD
4. BAPPELITBANGDA
5. Inspektorat
6. BUPATI

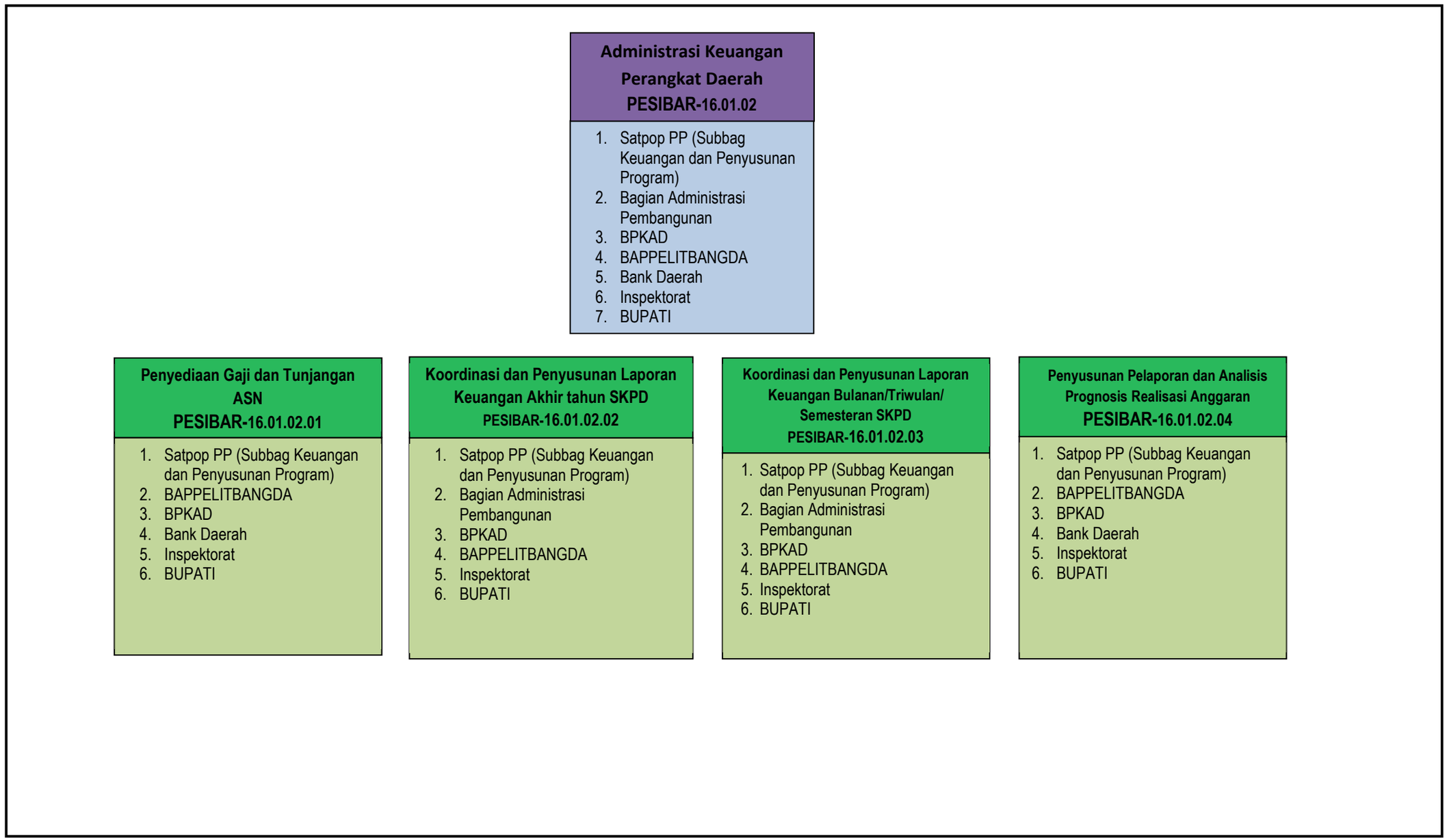
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
PESIBAR-16.01.02
1. Satpop PP (Subbag Keuangan dan Penyusunan Program)
2. Bagian Administrasi Pembangunan
3. BPKAD
4. BAPPELITBANGDA
5. Bank Daerah
6. Inspektorat
7. BUPATI
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
PESIBAR-16.01.02.01
1. Satpop PP (Subbag Keuangan dan Penyusunan Program)
2. BAPPELITBANGDA
3. BPKAD
4. Bank Daerah
5. Inspektorat
6. BUPATI
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD
PESIBAR-16.01.02.02
1. Satpop PP (Subbag Keuangan dan Penyusunan Program)
2. Bagian Administrasi Pembangunan
3. BPKAD
4. BAPPELITBANGDA
5. Inspektorat
6. BUPATI
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD
PESIBAR-16.01.02.03
1. Satpop PP (Subbag Keuangan dan Penyusunan Program)
2. Bagian Administrasi Pembangunan
3. BPKAD
4. BAPPELITBANGDA
5. Inspektorat
6. BUPATI
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
PESIBAR-16.01.02.04
1. Satpop PP (Subbag Keuangan dan Penyusunan Program)
2. BAPPELITBANGDA
3. BPKAD
4. Bank Daerah
5. Inspektorat
6. BUPATI

Administrasi Umum Perangkat Daerah
PESIBAR-16.01.03

1. Satpop PP (Subbag Umum dan Kepegawaian)
2. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
3. PLN
4. BAPPELITBANGDA
5. BPKAD
6. Bank Daerah
7. Inspektorat
8. BUPATI

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
PESIBAR-16.01.03.01

1. Satpop PP (Subbag Umum dan Kepegawaian)
2. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
3. PLN

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
PESIBAR-16.01.03.02

1. Satpop PP (Subbag Umum dan Kepegawaian)
2. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
PESIBAR-16.01.03.04

1. Satpop PP (Subbag Umum dan Kepegawaian)
2. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Fasilitasi Kunjungan Tamu
PESIBAR-16.01.03.05

1. Satpop PP (Subbag Umum dan Kepegawaian)
2. BPKAD

Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
PESIBAR-16.01.03.06

1. Satpop PP (Subbag Umum dan Kepegawaian)
2. BAPPELITBANGDA
3. BPKAD
4. Bank Daerah
5. Inspektorat
6. BUPATI

Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
PESIBAR-16.01.04

1. Satpop PP (Subbag Umum dan Kepegawaian)
2. BAPPELITBANGDA
3. BPKAD
4. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
5. Inspektorat
6. BUPATI

Pengadaan Mebel
PESIBAR-16.01.04.01

1. Satpop PP (Subbag Umum dan Kepegawaian)
2. BAPPELITBANGDA
3. BPKAD
4. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
5. Inspektorat
6. BUPATI

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
PESIBAR-16.01.05

1. Satpop PP (Subbag Umum dan Kepegawaian)
2. PLN
3. PDAM
4. TELKOM
5. DISKOMINFO
6. BAPPELITBANGDA
7. BPKAD
8. Inspektorat
9. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
10. SAMSAT
11. BUPATI

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
PESIBAR-16.01.05.01

1. Satpop PP (Subbag Umum dan Kepegawaian)
2. PLN
3. PDAM
4. TELKOM
5. DISKOMINFO

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
PESIBAR-16.01.05.02

1. Satpop PP (Subbag Umum dan Kepegawaian)
2. BAPPELITBANGDA
3. BPKAD
4. Inspektorat
5. BUPATI

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
PESIBAR-16.01.05.03

1. Satpop PP (Subbag Umum dan Kepegawaian)
2. BAPPELITBANGDA
3. BPKAD
4. Inspektorat
5. BUPATI

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
PESIBAR-16.01.06

1. Satpop PP (Subbag Umum dan Kepegawaian)
2. SAMSAT
3. BPKAD
4. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
5. BUPATI

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan
PESIBAR-16.01.06.01

1. Satpop PP (Subbag Umum dan Kepegawaian)
2. SAMSAT
3. BPKAD
4. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
5. BUPATI

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
PESIBAR-16.01.06.02

1. Satpop PP (Subbag Umum dan Kepegawaian)
2. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
3. BUPATI

Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
PESIBAR – 08.02.01

1. Satpop PP (Bidang Tibum dan Tranmas)
2. Sekolah
3. Kecamatan
4. Masyarakat
5. Anggota Linmas Pesisir Barat
6. TNI/POLRI
7. DISHUB
8. Perangkat Daerah Pemkab Pesisir Barat
9. DAMKAR
10. SEKDA

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
PESIBAR-08.02.01.01

1. Satpop PP (Bidang Linmas)
2. Sekda Pesisir Barat
3. BUPATI Pesisir Barat
4. Anggota Linmas Pesisir Barat

Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
PESIBAR-08.02.01.02

1. Satpop PP (Bidang Tibum dan Tranmas)
2. Sekolah
3. Kecamatan
4. Masyarakat

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
PESIBAR-08.02.01.03

1. Satpop PP (Bidang Tibum dan Tranmas)
2. TNI/POLRI
3. DISHUB
4. Perangkat Daerah Pemkab Pesisir Barat

Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
PESIBAR-08.02.01.04

1. Satpop PP (Bidang Tibum dan Tranmas)
2. POLRI
3. DISHUB
4. DAMKAR

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
PESIBAR – 08.02.02

1. Satpop PP (Bidang Tibum dan Tranmas)
2. Sekolah
3. Kecamatan
4. Masyarakat
5. Anggota Linmas Pesisir Barat
6. TNI/POLRI
7. DISHUB
8. Perangkat Daerah Pemkab Pesisir Barat
9. DAMKAR
10. SEKDA
11. BUPATI

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
PESIBAR-08.02.02.01

1. Satpop PP (Bidang Perda)
2. BPKAD
3. Seluruh Perangkat Daerah Terkait
4. Masyarakat
5. Inspektorat
6. Bupati

Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
PESIBAR-08.02.02.02

1. Biro Hukum
2. Satpop PP (Bidang Perda)
3. Masyarakat

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
PESIBAR – 08.02.03

1. Satpop PP (Bidang Perda)
2. SEKDA
3. Bupati

Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
PESIBAR-08.02.03.01

1. Satpop PP (Bidang Perda)
2. SEKDA
3. Bupati

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
PESIBAR – 08.01.01

1. Satpop PP (Bidang Damkar)
2. BAPPELITBANGDA
3. BPKAD
4. BPBD
5. Anggota Damkar
6. Seluruh Perangkat Daerah
7. Sekolah
8. Kecamatan/Desa
9. Masyarakat
10. Inspektorat
11. Bupati

Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
PESIBAR-08.01.01.01

1. Satpop PP (Bidang Damkar)
2. BAPPELITBANGDA
3. BPKAD
4. Seluruh Perangkat Daerah
5. Sekolah
6. Kecamatan/Desa
7. Masyarakat
8. Inspektorat
9. Bupati

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
PESIBAR-08.01.01.02

1. Satpop PP (Bidang Damkar)
2. BAPPELITBANGDA
3. BPKAD
4. DAMKAR
5. BPBD
6. Inspektorat
7. Bupati

Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
PESIBAR-08.01.01.03

1. Satpop PP (Bidang Damkar)
2. BAPPELITBANGDA
3. BPKAD
4. Anggota DAMKAR
5. Inspektorat
6. Bupati